

# **SKRIPSI**

## **DAMPAK IMPOR BERAS VIETNAM KE INDONESIA TAHUN 2017-2021 TERHADAP KETAHANAN PANGAN INDONESIA**



**CITRA YUNITA**

**1810521005**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS FAJAR  
MAKASSAR  
2022**

# **SKRIPSI**

## **DAMPAK IMPOR BERAS VIETNAM TAHUN 2017-2021 TERHADAP KETAHANAN PANGAN INDONESIA**



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

**CITRA YUNITA**  
**1810521005**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL**  
**UNIVERSITAS FAJAR**  
**MAKASSAR**  
**2022**

## **SKRIPSI**

# **DAMPAK IMPOR BERAS VIETNAM KE INDONESIA TAHUN 2017 – 2021 TERHADAP KETAHANAN PANGAN INDONESIA**

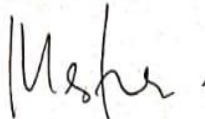
disusun dan diajukan oleh

**CITRA YUNITA  
1810521005**

telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan

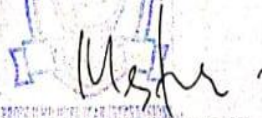
Makassar, 24 Agustus 2022

Pembimbing,



**Andi Meganingratna, S.IP., M.Si.**  
**NIDN: 0931108002**

**Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial  
Universitas Fajar**



**Andi Meganingratna, S.IP., M.Si.**  
**NIDN: 0931108002**

## SKRIPSI

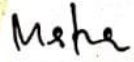
### DAMPAK IMPOR BERAS VIETNAM KE INDONESIA TAHUN 2017-2021 TERHADAP KETAHANAN PANGAN INDONESIA

disusun dan diajukan oleh

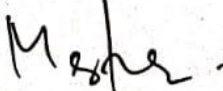
**CITRA YUNITA**  
**1810521005**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal **30 Agustus 2022** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Dewan Penguji,

| No. | Nama Penguji                                         | Jabatan    | Tanda Tangan                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Andi Meganingratna, S.IP., M.Si.<br>NIDN: 0931108002 | Ketua      | 1.   |
| 2.  | Dede Rohman, S.IP., M.Si.<br>NIDN: 0919057501        | Sekretaris | 2.  |
| 3.  | Dr. Syamsul Asri, S.IP., M.Fil.I<br>NIDN: 0926028502 | Anggota    | 3.  |
| 4.  | Kardina, S.IP., M.A.<br>NIDN: 0922068103             | Anggota    | 4.  |

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial  
Universitas Fajar

  
Andi Meganingratna, S.IP., M.Si.  
NIDN: 0931108002

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Citra Yunita  
NIM : 1810521005  
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **"DAMPAK IMPOR BERAS VIETNAM KE INDONESIA TAHUN 2017-2021 TERHADAP KETAHANAN PANGAN INDONESIA"** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU. No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, 30 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,

  
Citra Yunita

## **PRAKATA**

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'alaah karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dampak Impor Beras Vietnam ke Indonesia Tahun 2017 – 2021 Terhadap Ketahanan Pangan Indonesia.” Dalam skripsi ini dibahas mengenai latar belakang impor beras dan bagaimana kondisi ketahanan pangan Indonesia. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hubungan Internasional Universitas Fajar.

Selama penulisan dan penelitian skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Sehingga pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua, terkhusus Mama yang ada di Sidrap yang selalu memberikan dukungan berupa doa yang tidak ada putusnya. Walaupun jarang mengungkapkan kata-kata manis tapi yakinlah bahwa penulis sangat menyayanginya.
2. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Fajar.
3. Ibu Dr. Yusmanizar Ib Hernald selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial.
4. Ibu Meganingratna, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional dan dosen pembimbing yang cantik, baik hati, dan sangat banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

5. Para dosen dan Staff Prodi Ilmu Hubungan Internasional yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama proses perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi.
6. Bpk. M. Affandi Noho beserta staff di Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan yang sudah menerima penulis dan sangat membantu penulis demi kelancaran wawancara penelitian.
7. Bapak Aji dan Mama Aji yang selalu memberikan dukungan doa dan material pada penulis.
8. Sahabat-sahabat yang banyak menemani dan membantu penulis dalam hal apapun itu. Terima kasih Evi Nurtaqwa, Wahyuni, Dian Novita, Khofifa, Reskina, Fitriani Ismail, dan Shafira Balqis untuk foto-foto lucu Goldie dan Woofie.
9. Teman-teman angkatan Neoliberalisme 2018, terkhusus teman-teman kelas satu, terima kasih atas kisah indah yang kalian torehkan selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Fajar. Penulis sangat senang dan bersyukur dapat mengenal kalian, semoga impian sukses kita dapat tercapai suatu saat nanti.

## **ABSTRAK**

### **DAMPAK IMPOR BERAS VIETNAM KE INDONESIA TAHUN 2017-2021 TERHADAP KETAHANAN PANGAN INDONESIA**

Citra Yunita

Andi Meganingratna

Penelitian ini menjelaskan dan menganalisis tentang dampak impor beras dari Vietnam pada tahun 2017-2021 terhadap ketahanan pangan Indonesia. Penelitian ini menggunakan konsep dan teori perdagangan internasional, impor, dan ketahanan pangan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif analitik, dengan pengumpulan data melalui literatur, dokumen, media online, dan wawancara secara tidak terstruktur. Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa dampak yang ditimbulkan tidak begitu signifikan, yaitu dampak negative berupa harga beras berfluktuasi di pasaran, sedangkan dampak positifnya yaitu stok beras terpenuhi, impor beras lazim dilakukan selama kuota impor kecil, dan tujuan dilakukan impor bersifat politis. Sehingga dari dampak impor tersebut tidak mempengaruhi ketahanan pangan, karena produksi beras mencukupi konsumsi dan diversifikasi pangan.

**Kata Kunci: Beras, Impor Beras, Ketahanan Pangan Indonesia**

## **ABSTRACT**

### **VIETNAM RICE IMPORT EFFECT TO INDONESIA IN 2017-2021 TOWARD INDONESIA FOOD SECURITY**

**Citra Yunita**

**Andi Meganingratna**

*This research analyzed about rice import from Vietnam in 2017-2021 toward Indonesia food security. This research used concept and theory of international trade, import, and food security. Research method used was analytic qualitative, meanwhile the data collection is through literature, document, online media, and unstructured interview. The results indicated that the caused effect was not so significant, which the negative impact in the form of fluctuating rice prices in the market, while the positive impact was that the rice stock was fulfilled, rice imports were commonly executed as long as the import quota was small, and the purpose of the import was political. As the result that the effect of imports does not affect food security, because rice production is sufficient for consumption and food diversification.*

**Keyword: Rice, Rice Import, Indonesia Food Security**

## DAFTAR ISI

|                                                       |                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| HALAMAN SAMPUL .....                                  | i                                   |
| HALAMAN JUDUL .....                                   | ii                                  |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                             | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                               | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| HALAMAN PERNYATAAN .....                              | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| PRAKATA.....                                          | vi                                  |
| ABSTRAK INDONESIA .....                               | viii                                |
| BSTRAK INGGRIS .....                                  | ix                                  |
| DAFTAR ISI.....                                       | x                                   |
| DAFTAR TABEL .....                                    | xii                                 |
| DAFTAR GRAFIK.....                                    | xiii                                |
| BAB I <u>P</u> ENDAHULUAN.....                        | 1                                   |
| 1.1 Latar Belakang.....                               | 1                                   |
| 1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah .....        | 10                                  |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....                            | 10                                  |
| 1.4 Kegunaan Penelitian .....                         | 11                                  |
| BAB II <u>T</u> INJAUAN PUSTAKA.....                  | 12                                  |
| 2.1 Tinjauan Pustaka.....                             | 12                                  |
| 2.1.1 Perdagangan Internasional .....                 | 12                                  |
| 2.1.2 Ketahanan Pangan ( <i>Food Security</i> ) ..... | 22                                  |
| BAB III <u>M</u> ETODE PENELITIAN.....                | 27                                  |
| 3.1 Rancangan Penelitian .....                        | 27                                  |
| 3.2 Kehadiran Peneliti .....                          | 28                                  |
| 3.3 Lokasi Penelitian .....                           | 28                                  |
| 3.4 Sumber Data.....                                  | 28                                  |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data .....                     | 29                                  |

|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.6 Teknik Analisis Data .....                                                                | 30 |
| 3.7 Pengecekan Validasi Data .....                                                            | 31 |
| 3.8 Tahap-Tahap Penelitian .....                                                              | 31 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....                                                  | 33 |
| 4.1 Latar Belakang Impor Beras di Indonesia Tahun 2017 – 2021 .....                           | 33 |
| 4.2 Kondisi Impor Beras Vietnam ke Indonesia Tahun 2017 – 2021.....                           | 47 |
| 4.3 Dampak Impor Beras dari Vietnam Tahun 2017-2021 Terhadap Ketahanan Pangan Indonesia ..... | 54 |
| 4.3.1 Dampak Negatif .....                                                                    | 62 |
| 4.3.2 Dampak Positif.....                                                                     | 64 |
| BAB V PENUTUP .....                                                                           | 68 |
| 5.1 Kesimpulan .....                                                                          | 68 |
| 5.2 Saran .....                                                                               | 69 |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

| Tabel | Judul                                                                                         | Hal |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.1   | Daftar 10 Negara Penghasil Beras di Dunia Tahun 2016-2021.....                                | 34  |
| 4.2   | Perbandingan harga beras per kilogram (Rp) di negara-negara<br>Asia Tenggara Tahun 2018 ..... | 52  |

## DAFTAR GRAFIK

| Grafik | Judul                                                  | Hal |
|--------|--------------------------------------------------------|-----|
| 4.1    | Total Pengadaan Beras (ton) .....                      | 41  |
| 4.2    | Impor Beras Vietnam ke Indonesia Tahun 2017-2021 ..... | 51  |
| 4.3    | Produksi Beras Indonesia (2018-2021) .....             | 58  |

## DAFTAR LAMPIRAN

| No. | Judul                         | Hal |
|-----|-------------------------------|-----|
| 1.  | Surat Izin Penelitian         |     |
| 2.  | Surat Balasan Izin Penelitian |     |
| 3.  | Hasil Wawancara               |     |
| 2.  | Dokumentasi Hasil Wawancara   |     |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Ketahanan pangan adalah suatu kondisi dimana suatu negara mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Ketahanan pangan pada dasarnya merupakan pondasi pertahanan sebuah negara. Pangan menempati posisi dasar karena merupakan kelangsungan hidup umat manusia. Hal ini kemudian dapat menjelaskan mengapa negara-negara menaruh perhatian besar akan pemenuhan pangan, setelah serangkaian peristiwa yang membuat negara-negara sadar akan pentingnya ketahanan pangan.

Terdapat beberapa periode waktu yang menjelaskan bagaimana ketahanan pangan menjadi penting bagi negara-negara di dunia. Pertama, yaitu pada tahun 1930-1945, dimana pada saat itu sebuah survei dilakukan oleh Liga Bangsa-Bangsa (LBB) melaporkan bahwa terjadi kekurangan pangan akut di negara-negara miskin. LBB kemudian melakukan pertemuan dan menyepakati bahwa untuk memenuhi kebutuhan manusia perlu adanya peningkatan dalam produksi pangan yang akan memberi kemakmuran baik itu bagi pertanian dan juga pada industri.<sup>1</sup>

Periode kedua, yaitu pada tahun 1945-1970, dimana sebelumnya pada tahun 1943, negara-negara dunia memutuskan untuk mendirikan *Food and Agriculture Organization* (FAO). Badan Pangan yang baru didirikan tersebut lalu menyelenggarakan Survei Pangan Dunia tahun 1946, yang bertujuan untuk

---

<sup>1</sup> George Andre Simon, 'Food Security: Definition, Four Dimensions, History.', *Computational Mathematics and Modeling*, 17.4 (2012), 1-28, hlm. 10  
<<https://doi.org/10.1007/s10598-006-0028-y>>. [Diakses tanggal 14 April 2022]

mengetahui apakah kecukupan pangan terpenuhi, khususnya energi atau kalori yang cukup untuk semua orang. Namun hasilnya menyatakan bahwa setidaknya sepertiga dari populasi dunia tidak mendapatkan energi yang cukup.<sup>2</sup>

Hasil survei tersebut muncul bersama dengan trauma yang diderita akibat kurangnya pangan di Eropa dan Amerika Utara pasca perang dan mendorong pemerintah untuk lebih meningkatkan produksi pangan. Overproduksi dalam komoditas pertanian terjadi pada saat itu sehingga menghasilkan surplus pangan, dimana sisanya digunakan sebagai bantuan pangan untuk negara-negara yang masih menghadapi kerawanan pangan.

Periode ketiga, yaitu pada tahun 1970-1990 juga dikenal karena pada saat itu terjadi krisis pangan, yang kemudian melahirkan kesadaran akan pentingnya ketahanan pangan dunia. Saat itu terjadi perubahan akibat iklim yang buruk di beberapa wilayah di dunia. Penurunan produksi akibat iklim yang buruk membuat negara-negara harus melakukan impor pangan. Pada saat yang sama, *Organization of the Petroleum Exporting Countries* (OPEC) menaikkan harga minyak dunia sehingga biaya transportasi menjadi mahal dan berpengaruh pada naiknya harga komoditas pangan<sup>3</sup>. Konferensi Pangan Dunia yang berlangsung pada 1974 di Roma menjadi kesepakatan pertama yang mengakui bahwa ketahanan pangan menjadi perhatian bersama semua negara.<sup>4</sup>

Di Indonesia sendiri, krisis pangan sudah mulai terjadi sejak periode penjajahan Belanda yang muncul karena adanya kebijakan tanam paksa membuat petani hanya menanam komoditas ekspor utama, seperti teh, kopi dan tebu. Hal ini berlanjut pada periode penjajahan Jepang yang menerapkan sistem romusha sehingga membuat lahan pertanian terbengkalai dan membuat beras

---

<sup>2</sup> Ibid, Simon.

<sup>3</sup> Ibid, Simon, hlm. 15.

<sup>4</sup> Ibid, Simon.

menjadi langka. Sehingga pada saat itu masyarakat mau tidak mau mengonsumsi pangan diluar beras, seperti ubi, biji nangka dan lain-lain.<sup>5</sup>

Krisis pangan juga pernah terjadi di Indonesia akibat adanya fenomena El Nino pada tahun 1998. Akibat fenomena iklim El Nino menyebabkan produksi beras menurun drastis saat itu, Indonesia harus melakukan impor beras dengan jumlah besar yaitu sebanyak 5 juta ton.<sup>6</sup> Selain itu, adanya konversi lahan Indonesia yang sebelumnya pada tahun 2013 luas lahan sawah berkisar pada 8.128.499 hektar. Jumlah ini terus menurun pada tahun 2014 sebanyak lebih dari 16.906 yaitu tersisa 8.111.593 hektar saja. Begitu pun luas lahan kembali menurun pada tahun 2015 yang berkisar 8.087.393 hektar saja.<sup>7</sup> Dengan kata lain lahan pertanian menyusut seluas 110.000 hektar setiap tahunnya.<sup>8</sup> Penurunan luas lahan sawah ini kemudian memicu berbagai permasalahan pangan ke depannya. Menurunnya produktivitas dan produksi pangan, yang bisa mengakibatkan keterbatasan akan ketersediaan pangan.

Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris mayoritas bekerja pada sektor pertanian. Salah satu produksi utama dari pertanian adalah produksi beras. Beras menjadi sangat penting karena merupakan makanan pokok dan utama bagi penduduk Indonesia. Menjadi rumah bagi 273 juta jiwa penduduk, terdapat lebih dari 90% penduduk Indonesia bergantung pada beras sebagai kebutuhan pokoknya<sup>9</sup> dengan jumlah tenaga kerja pada sektor pertanian

---

<sup>5</sup> Heri Priyatmoko, 'Krisis Pangan Di Indonesia Sudah Terjadi Sejak Jaman Dahulu - KAGAMA' <<http://kagama.id/heri-priyatmoko-krisis-pangan-di-indonesia-sudah-terjadi-sejak-jaman-dahulu/>> [accessed 5 June 2022].

<sup>6</sup> Balitbangtan, 'Dinamika Produksi Dan Harga Beras Indonesia', 2014, 1–12.

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Inodnesia 2017* (Badan Pusat Statistik, 2017).

<sup>8</sup> B Sayaka and H Tarigan, 'Efektivitas Peraturan Dalam Mengendalikan Konversi Lahan Pertanian', *Konversi Dan Fragmentasi Lahan ...*, 2011 <<http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/konversi-fragmentasi-lahan/BAB-V-6.pdf>>.

<sup>9</sup> Sabarella, 'Konsumsi dan Neraca Penyediaan – Penggunaan Beras', Buletin Konsumsi Pangan, 10.1 (2019),

mencapai 29,76% atau sebanyak 38,23 juta orang.<sup>10</sup> Bahkan Indonesia pernah mencapai swasembada beras pada tahun 1984 dan berhasil memenuhi kebutuhan beras dalam negerinya.<sup>11</sup> Keberhasilan ini kemudian berasal dari kerjasama antar pihak yang terlibat dalam memantapkan para petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian secara modern.<sup>12</sup>

Sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar ke-empat di dunia dengan tingkat konsumsi yang tinggi mengharuskan Indonesia mampu menghadapi tantangan untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakatnya.<sup>13</sup> Namun untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut Indonesia selalu melakukan impor beras. Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk memperhatikan stok cadangan beras terpenuhi agar tetap mencukupi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan data dari Perum BULOG, stok ketahanan beras pada tahun 2012 yaitu sekitar 2,3 juta ton. Kemudian pada tahun 2013 sekitar 2,1 juta ton dan terus mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar 1,6 juta ton. Sedangkan pada tahun 2015 jumlah stok beras hanya sebesar 1,3 juta ton.<sup>14</sup> Walaupun stok cadangan beras masih berada pada batas aman, namun penurunan stok hingga satu juta ton dalam kurung waktu hanya empat tahun ini

---

<<http://epublikasi.setjen.pertanian.go.id/epublikasi/buletin/konsumsi/2019/Buletin%20Konsumsi%20Vol%2010%20No%201%202019.htm>> [Diakses tanggal 3 April 2022] (Bab IV)

<sup>10</sup> Cindy Mutia Annur. 2020, 'Sektor Pertanian Paling Banyak Menyerap Tenaga Kerja Indonesia', <[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/12/sektor-pertanian-paling-banyak-menyerap-tenaga-kerja-indonesia#:~:text=Badan%20Pusat%20Statistik%20\(BPS\)%20menyebut,atau%20sekitar%2029%2C76%25](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/12/sektor-pertanian-paling-banyak-menyerap-tenaga-kerja-indonesia#:~:text=Badan%20Pusat%20Statistik%20(BPS)%20menyebut,atau%20sekitar%2029%2C76%25)> [Diakses tanggal 3 April 2022]

<sup>11</sup> Sobih AW Adnan. 2016, 'BULOG dan Swasembada Pangan Era Orba', <<https://www.medcom.id/telusur/medcom-files/ObzJ1R1b-BULOG-dan-swasembada-pangan-era-orba>> [Diakses tanggal 3 April 2022]

<sup>12</sup> Tim Sindonews. 2019, 'Keberhasilan Swasembada Pangan Era Soeharto Dinilai Patut Ditiru', <<https://nasional.sindonews.com/berita/1410322/12/keberhasilan-swasembada-pangan-era-soeharto-dinilai-patut-ditiru?showpage=all>>

<sup>13</sup> R. Yulnita, Yenniwati, 'Analisis Produksi, Impor dan Konsumsi Komoditi Beras di Indonesia', Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, 1.2 (2019), 623-634, (hlm. 625)

<sup>14</sup> Databoks Katadata. 2018, 'Berapa Stok Beras Perum BULOG?' <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/16/berapa-stok-beras-perum-BULOG>> [Diakses tanggal 6 April 2022]

tidak seharusnya membuat pemerintah merasa aman begitu saja. Stok beras yang semakin menipis dikhawatirkan tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Bahkan Indonesia juga pernah digemparkan oleh isu beras yang mengandung bahan plastik.<sup>15</sup> Walaupun kemudian dari hasil uji laboratorium tidak ditemukan adanya kandungan plastik dalam beras tersebut, namun sudah terlanjur membuat resah masyarakat dan membentuk opini publik bahwa akibat pasokan beras yang kurang menyebabkan produsen beras mau tidak mau mencampurkan bahan plastik untuk menutupi kekurangan beras tersebut.

Berangkat dari krisis pangan dan permasalahan pangan yang pernah terjadi sebelumnya, maka bisa dilihat pentingnya masalah pangan dan menjadi alasan mengapa isu ini kemudian mengemuka. Maka dari itu, peningkatan pertumbuhan penduduk dan perubahan lahan pertanian yang terus berkurang menjadi salah satu penyebab terganggunya ketahanan pangan suatu negara. Sehingga pilihan negara untuk melakukan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya akibat kebutuhan manusia akan pangan semakin besar.

Masalah pemenuhan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia kemudian menjadi sasaran utama Indonesia dalam menyusun kebijakan pangan nasional. Pada era pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) isu pangan menjadi salah satu isu prioritas utamanya dengan mencanangkan kebijakan *Food Estate* (FE) atau kebijakan pangan skala luas pada saat itu. *Food Estate* merupakan salah satu kebijakan strategis SBY dalam program kerja 100 hari kabinet Indonesia Bersatu.<sup>16</sup> Pada tahun 2009 pemerintah mengesahkan

---

<sup>15</sup> Fabian Pratama Kusumah, 'Ekonomi Politik Dalam Kebijakan Impor Beras, Membaca Arah Kebijakan Pemerintah 2014-2019', *Jurnal Ilmu Politik*, 10.2 (2019), 137–62.

<sup>16</sup> Ardila Putri, 'Pengagendaan Isu Pangan Sebagai Isu Pangan Pada Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (Sby): Studi Pada Kebijakan Food Estate', *Jurnal PIR*:

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Pengembangan LP2B ini sendiri dilakukan melalui intensifikasi atau upaya untuk mengolah lahan pertanian yang ada khususnya melalui pemerintah daerah seperti penyuluhan dan pemberian benih unggul dan program ekstensifikasi (perluasan) untuk pengalihan fungsi lahan non-pertanian menjadi lahan pertanian. Namun dalam realisasinya masih belum membuahkan hasil yang signifikan.

Walaupun produksi beras dan produktivitas pada tahun 2012 mengalami peningkatan yaitu sebesar 43.498.439 ton beras dengan produktivitas 5.136 kg GKG/ha, namun dalam hal perbaikan produktivitas tersebut masih terbilang tidak signifikan. Terlebih produktivitas pada tahun 2010 mencapai 5.015 kg/ha dan kemudian menurun pada tahun 2009 dengan produktivitas 4.944 kg/ha.<sup>17</sup> Hal tersebut berarti persentase peningkatan produktivitas hanya sebesar 2,4% saja. Permasalahan yang dihadapi dari program tersebut adalah benih padi yang datang kualitasnya masih kurang baik, datang terlambat, varietasnya tidak sesuai yang diinginkan para petani, dan program ekstensifikasi pada lahan sawah belum dilakukan secara sepenuhnya oleh pemerintah.

Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban dalam memenuhi kecukupan pangan untuk semua penduduk Indonesia. Karena pemenuhan pangan perseorangan ini merupakan esensi dari ketahanan pangan. Kebutuhan pangan nasional terutama beras akan terus bertambah setiap tahun akibat jumlah penduduk yang terus meningkat. Berbagai permasalahan pangan seperti menyusutnya lahan pertanian, perubahan iklim, dan pertambahan jumlah

---

*Power in International Relations*, 4.1 (2020), 16 <<https://doi.org/10.22303/pir.4.1.2019.16-31>>.

<sup>17</sup> Wahyudi Rakib, *Kebijakan Politik Pangan Di Indonesia Pada Masa Pemerintahan SBY-Boediono (Studi Kasus: Kebijakan Pengadaan Beras Untuk Kebutuhan Masyarakat Di Indonesia)*, 2017.

penduduk setiap tahun itu kemudian memaksa pemerintah Indonesia untuk melakukan impor beras dari negara-negara Asia lainnya, termasuk Vietnam karena kebijakan pangan nasional yang belum bisa menanggulangi kebutuhan masyarakat Indonesia akan beras.

Impor beras adalah tindakan memenuhi pasokan beras dalam negeri dari negara lain secara legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Besarnya kebutuhan akan beras melatarbelakangi tingginya impor beras di Indonesia, termasuk impor yang dilakukan dari Vietnam. Indonesia dan Vietnam memulai hubungan resmi bilateral setelah dibukanya Konsulat RI di Hanoi pada 30 Desember 1955, menyusul pembukaan Kedutaan Besar RI pada 10 Agustus 1964.<sup>18</sup> Hubungan kerjasama perdagangan Indonesia dan Vietnam dalam hal impor beras tertuang dalam *Memorandum of Understanding (MoU) on Rice Trade* sejak tahun 2005.<sup>19</sup> BULOG kemudian atas arahan dari Menteri Perdagangan membeli beras dari *Vina Food Vietnam*. Perjanjian tersebut kemudian diperpanjang pada 2009 ketika Vietnam harus menyediakan setidaknya satu juta ton beras untuk Indonesia. Namun beras yang diimpor oleh Indonesia adalah beras khusus dan pemenuhannya untuk kebutuhan tertentu saja. Jenis beras yang diimpor juga cukup beragam, yaitu antara lain beras ketan utuh, beras basmati, beras japonica, beras jasmine, beras pecah, beras Hom Mali, dan beras kukus. Sistematis impor beras di Indonesia berawal dari pengeluaran izin untuk impor beras oleh Kementerian Perdagangan yang dasarnya mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2018, yang menjelaskan bahwa impor beras untuk keperluan umum atau beras

<sup>18</sup> Lisbet, 'Peningkatan Kerja Sama Bilateral Indonesia-Vietnam', *Http://Berkas.Dpr.Go.Id/*, Vol. IX, N.16 (2017) <[http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info\\_Singkat-IX-2-II-P3DI-Januari-2017-238.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-IX-2-II-P3DI-Januari-2017-238.pdf)>.

<sup>19</sup> Murdaningsih, Dwi., Satya Festiani. 2012, '*Indonesia Continues It's Rice Import From Vietnam*' < <https://www.republika.co.id/berita/malu3g/indonesia-continues-its-rice-import-from-vietnam> > [Diakses tanggal 6 April 2022]

jenis medium yang dikonsumsi oleh masyarakat hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Umum BULOG. Namun untuk beras jenis khusus, dapat dilakukan oleh perusahaan yang memenuhi ketentuan untuk melakukan kegiatan impor. Dalam Pasal 24 dijelaskan bahwa perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik dan melampirkan Angka Pengenal Importir (API) dan surat pernyataan yang mencantumkan kapasitas produksi industri bahan baku beras untuk perusahaan pemilik API-Produsen. Sehingga apabila permohonan telah lengkap dan benar, maka Menteri akan menerbitkan persetujuan impor.<sup>20</sup> Ketentuan impor beras lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 17, Pasal 19, dan Pasal 23.

Impor beras menjadi pilihan cepat tanggap pemerintah karena dapat dipenuhi dalam waktu yang singkat. Akan tetapi, tidak seharusnya pemerintah bergantung pada impor dan mengorbankan petani dengan melakukan impor dalam jumlah yang besar. Bahkan petani menjadi penting peranannya dalam mewujudkan ketahanan pangan, sesuai dengan Undang-Undang 19/2013 bahwa petani perlu diberikan perlindungan dan pemberdayaan dengan tujuan mendukung pemenuhan kebutuhan pangan guna mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan.<sup>21</sup>

Sebelum Vietnam menjadi negara eksportir beras terbesar di dunia, Vietnam pernah mengalami bencana kelaparan dan menjadi negara importir terbesar di kawasannya. Akibat keadaan yang buruk tersebut, Vietnam

---

<sup>20</sup> Menteri Perdagangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Beras*, 2018.

<sup>21</sup> M Zainul Abidin, 'Dampak Kebijakan Impor Beras Dan Ketahanan Pangan Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial Impact of the Rice Import Duty Policy and Food Security in the Perspective of Social Welfare', *Jurnal Sosio Informa*, 1.3 (2015), 213–30 <<https://media.neliti.com/media/publications/52839-ID-dampak-kebijakan-impor-beras-dan-ketahan.pdf>>.

menerapkan *Đổi Mới*<sup>22</sup> untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunannya, terutama pada sektor pertanian padi karena menjadi makanan utama dan pengalaman pahit yang telah dilalui sebelumnya.<sup>23</sup> Kerja keras pemerintah Vietnam dalam melakukan reformasi lahan pertanian dan perbaikan irigasi pun membuahkan hasil yang memuaskan, akibatnya produksi beras menjadi melimpah dan dapat memenuhi kebutuhan beras untuk masyarakatnya dan lebihnya digunakan untuk melakukan ekspor ke negara lain sehingga Vietnam mampu menjaga ketahanan pangan dalam negeri.

Impor beras Vietnam ke Indonesia mengalami kondisi fluktuasi yang besar dari tahun ke tahun. Total impor beras terbesar pernah terjadi pada tahun 2011 sebesar 2,7 juta ton, di mana Vietnam menjadi negara pengirim beras terbesar dengan jumlah 1,7 juta ton.<sup>24</sup> Namun pernah terjadi kondisi dimana Pemerintah Indonesia untuk sementara waktu berhenti melakukan impor 1 juta ton. Kondisi tersebut tepatnya terjadi pada tahun 2017 dimana pemberlakuan impor hanya diperuntukkan pada beras premium yang dibutuhkan untuk hotel, warga negara asing, dan restoran tertentu, seperti restoran yang bernuansa Timur Tengah.<sup>25</sup> Impor beras yang masuk mengalami penurunan akibat stok beras di gudang BULOG melebihi target yang ditentukan, yaitu berkisar 1,7 – 1,8 juta ton beras.<sup>26</sup> Bahkan mengalami stok berlimpah hingga pada beberapa daerah yang sentra produksi harus mendistribusikan berasnya keluar daerah

---

<sup>22</sup> *Đổi Mới* merupakan sebutan untuk kebijakan reformasi ekonomi yang memperkenalkan Vietnam pada ekonomi global untuk terbuka pada pasar bebas.

<sup>23</sup> Presilla, Mayasuri. 2021. Mengulas Peran Startegis Beras di Negara Vietnam, <<http://psdr.lipi.go.id/news-and-events/opinions/mengulas-peran-strategis-beras-di-negara-vietnam.html>> [Diakses tanggal 10 April 2022]

<sup>24</sup> *Badan Pusat Statistik Impor Beras Menurut Negara Asal Utama 2000-2020*. 2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

<sup>25</sup> Achmad Fauzi, 'Kemendag Benarkan Indonesia Tidak Lagi Impor Beras', 2017 <<https://money.kompas.com/read/2017/03/28/123205526/kemendag.benarkan.indonesia.tidak.lagi.impor.beras>> [accessed 29 April 2022].

<sup>26</sup> Septian Deny, 'Stok Beras Di Awal 2017 Mencapai 1,8 Juta Ton', 2017 <<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2844289/stok-beras-di-awal-2017-mencapai-18-juta-ton>> [accessed 20 July 2022].

yang defisit beras. Fenomena tersebut terjadi pada awal tahun 2017 dimana waktu musim panen beras bagi petani. Namun impor itu mulai diberlakukan kembali pada akhir tahun tepatnya pada bulan November 2017 dengan mengimpor sebanyak 57,9 ribu ton.<sup>27</sup>

Peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan konsumsi pada bahan pangan, namun juga akan semakin mempersempit lahan sawah karena tingginya permintaan akan lahan non-pertanian yang digunakan untuk membangun perumahan, infrastruktur, pusat industri dan lain-lain. Dalam memenuhi kebutuhan pangan, pemerintah lalu bergantung pada pembelian beras dari luar negeri. Namun impor yang dilakukan justru mengundang kekecewaan bagi para petani lokal, dan ditakutkan akan berakibat pada keadaan ketahanan pangan dalam negeri. Sehingga berdasarkan penjelasan di atas, penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak impor beras Vietnam pada tahun 2017-2021 dalam mencapai ketahanan pangan Indonesia.

## **1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah**

Penelitian ini akan membahas impor beras dan ketahanan pangan, sehingga berdasarkan hal tersebut, penulis merumuskan permasalahan yang akan diangkat, yaitu bagaimana dampak impor beras Vietnam pada tahun 2017-2021 terhadap ketahanan pangan Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.3.1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi impor beras di Indonesia.

---

<sup>27</sup> 'Berapa Impor Beras Indonesia 2017?', 2017  
 <boks.katadata.co.id/datapublish/2017/12/07/berapa-impor-beras-indonesia-2017#:~:text=Volume Impor Beras Indonesia 2017> [accessed 24 July 2022].

- 1.3.2. Mengetahui dampak impor beras Vietnam tahun 2017-2021 yang dilakukan Indonesia terhadap ketahanan pangannya.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis maupun akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagaimana impor yang dilakukan berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Ketahanan pangan penting agar semua masyarakat dapat mengakses pangan dengan mudah. Dalam memenuhi pangan masyarakat, impor beras dilakukan dengan berbagai macam pertimbangan. Namun di sisi lain, impor beras menjadi polemik karena Indonesia dipandang sebagai negara agraris dan penghasil beras tetap melakukan impor secara besar-besaran untuk pemenuhan berasnya. Sehingga kedepannya dapat memberikan informasi terkait konsep impor dan ketahanan pangan, serta menjadi bahan kajian bagi para akademisi, baik bagi program Studi Hubungan Internasional maupun di luar program studi tersebut.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait dampak impor beras Vietnam terhadap ketahanan pangan Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi penyusunan skripsi, khususnya yang berminat mengangkat topik yang berkaitan dengan impor beras dan ketahanan pangan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam mengkaji dampak impor beras dan ketahanan pangan dibutuhkan teori dan konsep untuk menganalisis kedua hal tersebut. Adapun teori yang digunakan yaitu teori perdagangan internasional, dengan menggunakan konsep impor dan *food security* atau ketahanan pangan.

##### 2.1.1 Perdagangan Internasional

Menurut Harry Waluya, "*International Business*" atau "Perdagangan Internasional" didefinisikan terdiri dari kegiatan-kegiatan perniagaan dari suatu negara asal (*country of origin*) yang melintasi perbatasan menuju suatu negara tujuan (*country of destination*) yang dilakukan oleh perusahaan *multinational corporation* (MNC) untuk melakukan perpindahan barang dan jasa, perpindahan modal, perpindahan tenaga kerja, perpindahan teknologi (pabrik) dan perpindahan merek dagang.<sup>28</sup>

Selanjutnya oleh Mahyus Ekananda perdagangan internasional adalah aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Sedangkan penduduk yang dimaksud adalah hubungan antara individu-individu, individu-pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan negara lain.<sup>29</sup>

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara ke negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Melalui

---

<sup>28</sup> Waluya, Harry. 2003. *Ekonomi Internasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

<sup>29</sup> Yona Namira, Iskandar Andi Nuhung, and Mudatsir Najamuddin, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Impor Beras Di Indonesia', *Agribusiness Journal*, 11.2 (2019), 183–201 <<https://doi.org/10.15408/aj.v11i2.11843>>.

perdagangan ini, kemakmuran suatu negara dapat meningkat dan negara juga dapat memenuhi kebutuhan penduduknya. Aktivitas perdagangan internasional dilakukan dengan mengirim dan menerima barang dari suatu negara ke negara lain, sehingga terjadi yang disebut impor dan ekspor barang.<sup>30</sup>

Dalam kaitannya dengan sektor pangan, menurut Jennifer Clapp perdagangan internasional dianggap sebagai sebuah peluang untuk meningkatkan ketahanan pangan.<sup>31</sup> Pendapat yang menjadikan perdagangan internasional dapat meningkatkan ketahanan pangan dirujuk dari teori keunggulan komparatif yang menyebutkan bahwa keuntungan dari spesialisasi dan perdagangan seharusnya meningkatkan ketersediaan pangan dan akses pangan. Pendapat ini ditunjang oleh beberapa hal, seperti penghapusan hambatan perdagangan mendorong persaingan pasar dan spesialisasi berdasarkan keuntungan komparatif; efisiensi produksi pangan meningkat karena pangan ditanam di negara-negara yang memiliki biaya produksi rendah; produksi pertanian yang efisien menghasilkan pasokan pangan yang lebih besar dalam skala global; pasokan pangan yang melimpah serta diperdagangkan dengan bebas akan menghasilkan ketersediaan pangan namun dengan harga murah di semua negara dan pada akhirnya akan meningkatkan ketahanan pangan suatu negara; dan melalui pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja, sehingga meningkatkan kemampuan dalam mengakses pangan yang pada akhirnya akan meningkatkan ketahanan pangan.

Di dalam teori perdagangan internasional dikenal konsep keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif dalam teori perdagangan internasional oleh

---

<sup>30</sup> Hastina Febriaty, 'Analisis Perkembangan Impor Beras Di Indonesia', *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 16.2 (2016), 134–41 <<https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v16i2.941>>.

<sup>31</sup> Jennifer Clapp, 'Food Security and International Trade Unpacking Disputed Narratives', *Food and Agriculture Organization of the United Nations*, 2015, 33 <<https://doi.org/10.2307/2620834>>.

David Richardo menjelaskan walaupun suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut dapat tetap melakukan perdagangan internasional. Artinya perdagangan tetap menguntungkan jika negara memfokuskan produksinya terhadap barang yang memiliki kerugian absolut paling kecil.<sup>32</sup> Keunggulan komparatif tercapai apabila suatu negara mampu memproduksi sebuah barang dan jasa yang ditawarkan dengan harga lebih murah daripada negara lain.

Terdapat penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai bahan acuan yaitu penelitian yang berjudul “Liberalisasi Perdagangan Sektor Beras dan Ketahanan Pangan di Indonesia” oleh Rangga Utama Atmadilaga.<sup>33</sup> Atmadilaga dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam memenuhi pangan domestik tidak akan terlepas jauh dari aktivitas perdagangan internasional, sehingga ketahanan pangan suatu negara tentu dipengaruhi oleh kebijakan perdagangan internasional. Lebih lanjut penelitian ini menjelaskan perlunya dilakukan liberalisasi perdagangan pada sektor pertanian Indonesia, yaitu pertama berdasarkan teori keunggulan komparatif yang mengemukakan bahwa melalui liberalisasi perdagangan maka produksi pangan lebih efisien yang berarti pasokan pangan lebih banyak tersedia dengan harga yang murah. Kedua, adanya kewajiban yang ditanggung berdasarkan moralitas untuk mendistribusikan pangan dari wilayah surplus ke wilayah yang defisit beras melalui perdagangan internasional. Menurut penulis dari artikel penelitian tersebut sangat jelas bahwa perdagangan beras berdampak pada ketahanan pangan suatu negara, khususnya di Indonesia. Karena dari perdagangan itu lah akan memberikan pasokan beras kepada Indonesia untuk kebutuhan dalam

---

<sup>32</sup> I'id Badry Sa'idy, 'Analisis Daya Saing Komoditas Tekstil Dan Produk Tekstil Indonesia Di Amerika Serikat', *Economics Development Analysis Journal*, 2.4 (2013), 269–76.

<sup>33</sup> Atmadilaga, Rangga Utama. 2017. 'Liberalisasi Perdagangan Sektor Beras Dan Ketahanan Pangan Di Indonesia.' Skripsi. Bandung : Universitas Katolik Parahyangan. <<http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/2025/Cover> - Bab 1 - 3111061sc-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

negerinya. Namun di samping itu juga apabila impor yang dilakukan berlebihan dan massif maka akan meningkatkan ketergantungan pada impor beras tersebut serta memicu turunnya harga beras di pasar domestik apabila beras impor juga merembes ke pasar tersebut.

Lebih lanjut penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian Iwan Hermawan yang berjudul “Analisis Perdagangan Beras dan Ketahanan Pangan di Negara-Negara Asia Tenggara.”<sup>34</sup> Penelitian tersebut menjelaskan bahwa perdagangan beras dilakukan oleh negara-negara Asia Tenggara untuk menjaga stok beras yang cukup untuk kebutuhan domestiknya. Selain untuk melakukan perdagangan beras di dalam wilayah Asia Tenggara, perdagangan beras juga dilakukan dan didistribusikan ke berbagai pasar di dunia. Sub Sahara Afrika adalah tujuan utama perdagangan beras di luar wilayah Asia Tenggara, dan sisanya baru ke negara lainnya. Adapun negara-negara Asia Tenggara mengintervensi pasar beras melalui serangkaian kebijakan perdagangan internasional, baik itu dengan larangan ekspor maupun lisensi atau pemberian izin, dan kebijakan stabilisasi harga beras domestik yang tak lain dilakukan untuk menjaga stok beras untuk memperkuat ketahanan pangan.

Penelitian lainnya yang menjelaskan bagaimana perdagangan internasional komoditas beras juga dilakukan oleh Benny Rachman dan Saktyanu K. Dermoredjo yang berjudul “Dinamika Harga dan Perdagangan Beras.”<sup>35</sup> Dalam tulisan ini menjabarkan bagaimana situasi perdagangan internasional beras. Produksi beras dunia yang terus meningkat sejalan dengan meningkatnya produksi beras di negara-negara produsen utama, seperti

---

<sup>34</sup> Iwan Hermawan, ‘Analisis Perdagangan Beras Dan Ketahanan Pangan Di Negara-Negara Asia Tenggara’, *Jurnal Politica*, 4.2 (2013), 157–96.

<sup>35</sup> Benny dan Saktyanu K. Dermoredjo Rachman, ‘Dinamika Harga Dan Perdagangan Beras’, *Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian*, 2004 <<https://www.litbang.pertanian.go.id>>.

Vietnam, Myanmar, dan Thailand. Peningkatan produksi beras kemudian menyebabkan volume beras yang diperdagangkan di pasar internasional juga bertambah. Walaupun begitu, beras yang diperdagangkan di pasar dunia masih terbilang relatif kecil dibandingkan dengan volume perdagangan seperti jagung, kedelai dan gandum.

Lebih lanjut menurut penulis yang perlu diperhatikan bahwa tidak semua negara produsen beras kemudian menjadi negara pengekspor beras. Hal tersebut terjadi karena beras yang dialokasikan dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri juga tinggi. Maka dari itu, negara dengan surplus beras yang melakukan perdagangan beras di pasar dunia tidak stabil karena pengaruh musim dan bagaimana keadaan ketahanan pangan pada masing-masing negara. Pemerintah yang mengalokasikan beras untuk konsumsi domestik menyebabkan beras yang diperdagangkan sangat terbatas. Kebutuhan impor yang meningkat, sedangkan beras yang diperdagangkan pada pasar dunia juga sangat tipis (*thin market*) sehingga mengakibatkan perdagangan dunia sangat rentan.

Dari ketiga penelitian terdahulu diatas, menjelaskan bahwa negara-negara melakukan perdagangan atas dasar kesepakatan bersama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain itu, perdagangan internasional khususnya dalam sektor pangan, dapat meningkatkan ketahanan pangan suatu negara. Lebih lanjut juga terdapat fenomena dimana produksi beras yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan domestik membuat surplus yang diperdagangkan negara-negara di dunia juga terbatas. Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa tulisan ini menjadi acuan karena penelitian ini berfokus pada perdagangan internasional yaitu memperdagangkan ke luar (impor) beras Vietnam terhadap ketahanan pangan.

Di dalam teori perdagangan internasional juga dikenal konsep impor. Impor adalah kegiatan dalam perdagangan internasional dengan memasukkan komoditas barang dari negara lain ke dalam negeri, yang dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Proses impor barang secara besar-besaran pun membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim dan negara penerima.<sup>36</sup>

Lebih lanjut Hutabarat dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Jimmy Benny juga menjelaskan impor sebagai perdagangan yang memasukkan barang dari luar ke wilayah Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.<sup>37</sup>

Menurut Larassati, impor merupakan arus masuk barang dan jasa ke dalam pasar sebuah negara baik itu untuk keperluan konsumsi ataupun sebagai barang modal atau bahan baku produksi dalam negeri. Dalam hal ini, semakin besar impor yang dilakukan maka dapat menyediakan kebutuhan rakyat sebuah negara akan tetapi di sisi lain dapat mematikan produk atau jasa sejenis dalam negeri.<sup>38</sup>

Sedangkan menurut *Asian Development Bank* (ADB), impor dapat membantu dalam menurunkan harga pangan bagi kelompok yang mengalami kelaparan atau bergizi buruk sehingga impor hadir dan menjadi penunjang ketersediaan pangan ketika terjadi kekeringan, banjir, dan gangguan lain yang menyebabkan produksi pangan terhambat. Bahkan pada beberapa negara berkembang, impor pangan dapat menurunkan ekspektasi inflasi akibat dari kontribusi pangan terhadap indeks harga konsumen. Impor pangan juga dapat

---

<sup>36</sup> Jimmy Benny, 'Ekspor Dan Impor Pengaruhnya Terhadap Posisi Cadangan Devisa Di Indonesia', *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1.4 (2013), 1406–15.

<sup>37</sup> Ibid, Benny, hlm. 1408.

<sup>38</sup> Edward Christianto, 'Faktor Yang Memengaruhi Volume Impor Beras Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomia Asia*, 7.2 (2013), 38–43.

mengurangi produksi pada wilayah yang rawan pada kerusakan lingkungan, sehingga melakukan impor setidaknya membantu sebuah wilayah tertentu tidak terjadi degradasi lingkungan.<sup>39</sup>

Pengertian impor juga dimuat dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2006 yang menyebut bahwa impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Semua barang yang dimaksudkan adalah semua atau seluruh barang dalam bentuk dan jenis apa saja yang masuk ke dalam daerah pabean.<sup>40</sup>

Literatur yang menjelaskan bagaimana impor beras yang dilakukan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu berasal dari penelitian Purbayu Budi Santosa dan Ondo Harinduan PS berjudul, “Analisis Impor Beras Indonesia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya.” Hasil penelitian yang dilakukan oleh Santoso dan Harinduan mengemukakan, bahwa variabel produksi beras, nilai kurs Rupiah terhadap Dollar AS, dan tarif impor beras secara signifikan mempengaruhi variabel impor beras.<sup>41</sup>

Penelitian kedua yaitu berjudul “Faktor Yang Mempengaruhi Volume Impor Beras di Indonesia” yang ditulis oleh Edward Christianto.<sup>42</sup> Christianto dalam tulisannya juga menjelaskan bahwa untuk sektor pertanian Indonesia digunakan untuk memproduksi beras sehingga beras tidak boleh mengalami kekurangan stok dalam negeri. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mencukupi kebutuhan beras dalam negerinya yaitu dengan melakukan impor

---

<sup>39</sup> Douglas H. Brooks, Benno Ferrarini, and Eugenia C. Go, ‘Bilateral Trade and Food Security’, *ADB Economics Working Paper Series*, 367.367 (2013), 1–37, hlm. 1-3 <<https://doi.org/10.1142/s1793993313500154>>.

<sup>40</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, <[https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download\\_index/files/47355-02.17-tahun-2006-kepabeanan.pdf](https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/47355-02.17-tahun-2006-kepabeanan.pdf)> [Diakses tanggal 1 Mei 2022]

<sup>41</sup> Ondo Harinduan PS Purbayu Budi Santosa, ‘Analisis Impor Beras Indonesia Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya’, *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 3.2 (2006), 193–209 <<https://media.neliti.com/media/publications/294057-analisis-impor-beras-indonesia-dan-fakto-8644bcc0.pdf>>.

<sup>42</sup> Ibid, Christianto.

beras. Walaupun produksi beras Indonesia terus meningkat tiap tahun, namun volume impor yang dilakukan juga sangat tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti harga beras dan tingkat konsumsi beras per kapita per tahun yang tinggi.

Harga beras dalam negeri mengalami kenaikan pada tahun 2008. Walaupun produksi beras selalu meningkat namun harga beras Indonesia masih melampaui harga beras dunia. Pemerintah Indonesia lalu melakukan impor beras dengan pertimbangan bahwa harga beras di pasaran internasional lebih murah sehingga efisiensi bisa dilakukan.

Menyinggung persoalan diatas bahwa sektor pertanian di Indonesia digunakan untuk memproduksi padi, posisi beras kemudian menjadi penting dibandingkan posisi bahan pangan lainnya seperti, jagung, ubi, dan bahkan gandum yang tingkat konsumsinya juga tinggi. Beberapa alasan seperti, beras memiliki nilai budaya dan historis karena sejak dulu masyarakat Indonesia lebih mengenal padi, bukan gandum. Bahkan dulu ikon swasembada pangan tercapai jika produksi beras surplus dan mampu melebihi konsumsi masyarakat Indonesia. Alasan lain, jika dibandingkan dengan bahan pokok lainnya yang penggunaannya termasuk tinggi di Indonesia seperti tepung yang bersumber dari tanaman gandum, gandum merupakan tanaman sub tropis yang habitatnya kurang cocok di Nusantara. Maka dari itu sangat sulit untuk mengembangkan tanaman tersebut sehingga menjadi alasan mengapa beras menjadi penting posisinya diatas pangan pokok lainnya.

Penelitian yang mendukung akan pengaruh harga beras domestik terhadap impor beras juga dilakukan oleh Sahrul Paipan dan Muhammad Abrar dengan judul, "Determinan Ketergantungan Impor Beras di Indonesia." Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa harga beras domestik berpengaruh

signifikan dan positif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Di dalam jangka pendek ditunjukkan dengan nilai  $t$ -hitung  $4,88 > t$ -tabel  $1,74$  dengan koefisien  $8,38$ . Artinya peningkatan harga beras sebesar 1 persen akan meningkatkan impor beras sebesar  $8,38$  persen dalam jangka pendek. Sementara itu, di dalam jangka panjang dapat dilihat dari nilai  $t$ -hitung  $2,44 > t$ -tabel  $1,73$  dengan koefisien  $5,28$ . Peningkatan harga beras domestik sebesar 1 persen akan meningkatkan impor sebesar  $5,28$  persen.<sup>43</sup> Lebih lanjut oleh Onu D.O, Simonyan, dan Onyenweaku dalam “*Determinants of Rice Production and Import in Nigeria (1970 – 2016): An Application of Co-Integration and Error Correction Model*” juga mengemukakan jika impor beras secara positif merespon terhadap jumlah konsumsi beras selama satu tahun, nilai tukar, harga beras domestik, jumlah penduduk, dan harga impor beras.<sup>44</sup>

Literatur lainnya dituliskan oleh M. Husein Sawit dengan judul, “Program RASKIN: Keserasian antara Produksi, Pengadaan Dalam Negeri dan Dukungan Politik” yang menjelaskan bahwa semakin tinggi volume RASKIN maka risiko pemerintah Indonesia untuk mengimpor beras juga semakin tinggi. Pemerintah daerah juga menolak jika beras bantuan tersebut berasal dari beras impor. Hasil dari penelitian tersebut menyarankan untuk jangka pendek volume RASKIN adalah sekitar 2 juta ton, lebih spesifiknya yaitu berkisar antara 1,8-2,2 juta ton per tahun. Tidak dianjurkan penyaluran RASKIN lebih dari 2,5 juta ton per tahun.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Sahrul Paipan & Muhammad Abrar, ‘DETERMINAN KETERGANTUNGAN IMPOR BERAS DI INDONESIA ( Determinants of Rice Import Dependency in Indonesia )’, *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 11.01 (2020), 53–64.

<sup>44</sup> D.O. Onu, J.B. Simonyan, and C.E. Onyenweaku, ‘Determinants of Rice Production and Import in Nigeria ( 1970 – 2016 ): An Application of Co-Integration and Error Correction Model’, *Futo Journal Series*, 3.2 (2017), 16–34.

<sup>45</sup> Husein M Sawit, ‘Program RASKIN: Keserasian Antara Produksi, Pengadaan Dalam Negeri Dan Dukungan Politik’, *Jurnal Pangan* 21.1 (2012), 71–84.

Berikutnya literatur yang ditulis oleh Sulhani Hermawan dengan judul “Dampak Peraturan Tentang Impor Beras Terhadap Kegagalan Ketahanan Pangan dan Kemiskinan Petani di Indonesia” juga diambil sebagai bahan acuan oleh penulis.<sup>46</sup> Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa impor beras dilakukan untuk menambah pasokan untuk menurunkan harga beras di pasar. Namun sebaliknya justru membuat ketergantungan pada bahan impor dan akibatnya petani harus bersaing dengan banjirnya bahan impor tersebut. Impor beras dianggap berdampak buruk bagi pertanian padi karena akan melemahkan kemampuan untuk memastikan ketersediaan pangan. Namun bagi penulis apabila impor yang dilakukan hanya untuk jenis beras tertentu saja yang tidak ditanam di Indonesia maupun ditanam tapi dalam jumlah kecil serta pemenuhannya hanya untuk hotel atau restoran tertentu maka tidak masalah untuk dilakukan.

Dari penelitian tersebut, penulis sepenuhnya setuju dengan pandangan kritis yang dibawa oleh Hermawan terkait dengan impor beras berdampak sangat buruk untuk pertanian padi dan sebagai solusi untuk kekurangan stok nasional. Karena jika impor terus dilakukan maka akan menekan produksi pangan, khususnya beras dan akan terus menurunkan kemampuan petani untuk memproduksi beras. Sedangkan ancaman lain yang dapat memicu kegagalan ketahanan pangan juga datang dari konversi lahan sawah yang semakin nyata dihadapi akibat dari perkembangan pesat dari pertumbuhan penduduk yang meningkatkan kebutuhan akan perumahan hingga kawasan industri saat ini. Lebih lanjut ancaman seperti diversifikasi pangan yang masih kurang. Contoh nyata untuk fenomena ini dapat dilihat dari bagaimana Papua dipaksa untuk

---

<sup>46</sup> Sulhani Hermawan, ‘Dampak Peraturan Tentang Impor Beras Terhadap Kegagalan Ketahanan Pangan Dan Kemiskinan Petani Di Indonesia’, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 42.4 (2012), 456 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol42.no4.266>>.

menanam padi padahal mayoritas masyarakat di Papua mengonsumsi sagu sebagai pangan pokoknya. Pemerintah begitu terpaku pada swasembada pangan baru terwujud jika dapat memproduksi beras dalam jumlah besar, tetapi mengesampingkan bahan pangan lainnya. Hal yang sama juga terjadi pada gandum. Indonesia bergantung pada gandum padahal bukan negara dengan penghasil gandum. Padahal hampir semua olahan makanan Indonesia menggunakan gandum sebagai bahan bakunya, seperti terigu, indomie, roti, dan sebagainya.

### 2.1.2 Ketahanan Pangan (*Food Security*)

Menurut *Food and Agriculture Organization* (FAO), ketahanan pangan didefinisikan sebagai setiap orang dalam sepanjang waktu, baik fisik dan ekonomi, memiliki akses fisik terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sesuai preferensinya untuk hidup aktif dan sehat.<sup>47</sup>

Pengertian ketahanan pangan juga disebutkan dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menyebutkan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.<sup>48</sup> Untuk mewujudkan ketahanan pangan harus didasari pada interaksi antara subsistem, yaitu meliputi

---

<sup>47</sup> 'Food Security - International Relations - LibGuides at Michigan State University Libraries' <<https://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=96739&p=626933>> [Diakses tanggal 12 April 2022].

<sup>48</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan 2012.

ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, serta kualitas dan keamanan pangan.<sup>49</sup>

Selanjutnya definisi ketahanan pangan datang dari Clay yang membagi pengertian ketahanan pangan dalam dua tingkat. Pada tingkat nasional, diartikan bahwa ketersediaan stok pangan yang cukup di negara tersebut untuk memenuhi kebutuhan nasional, hingga stok dapat terpenuhi lagi baik melalui panen maupun impor. Sedangkan pada tingkat individu, berarti semua anggota masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang mereka butuhkan, baik dari pasar dan produksi sendiri.<sup>50</sup>

Menurut Barbara D. Huddleston ketahanan pangan adalah jaminan bahwa pasokan dan pembiayaan tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat tanpa kenaikan harga domestik, terlepas dari kondisi pasar dunia. Artinya pasokan pangan tidak terpengaruh dari harga beras dunia, sehingga masyarakat tetap dapat mengakses pangan tanpa kenaikan harga beras di pasaran domestik.<sup>51</sup>

Apabila dilihat dari sejarahnya, ketahanan pangan ada sebagai reaksi atas krisis pangan global. Setelah dikemukakan pada tahun 1974, organisasi-organisasi internasional mendapati temuan bahwa akan ada potensi kelaparan yang dialami oleh 800 juta penduduk bumi.<sup>52</sup> Atas dasar temuan tersebut, pemerintah dari berbagai Negara yang melalui *World Food Summit 1996* dan slogan pangan bagi semua (*food for all*) kemudian menyepakati Deklarasi Roma.

---

<sup>49</sup> Sabarella, dkk. 2021. Analisis Ketahanan Pangan Tahun 2021. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian.

<sup>50</sup> Simon Maxwell and Timothy R. Frankenberg, *Household Food Security: Concepts, Indicators, Measurements, Technical Review* (New York: UNICEF and IFAD, 1992), hlm. 145 [Diakses tanggal 19 April 2022].

<sup>51</sup> Ibid, Maxwell and R. Frankenberg, hlm. 156.

<sup>52</sup> Zulkhair Burhan, 'Peran Sulawesi Selatan Dalam Strategi Lumbung Pangan BIMP-EAGA (BIMP-EAGA Food Basket Strategy)', *Jurnal Wanua*, 1.01 (2015), 58–76.

Deklarasi Roma tentang *World Food Security* dan *World Food Summit Plan of Action* menegaskan jika ketahanan pangan menyentuh semua level mulai dari individu hingga secara global.<sup>53</sup> Pertemuan tersebut hadir melalui serangkaian pengaturan dan kelembagaan yang memuat informasi, sumber daya untuk mempromosikan keamanan pangan dan forum dialog mengenai isu-isu kebijakan terkait pangan.<sup>54</sup>

Untuk menunjang penelitian yang tengah dilakukan, penulis menggunakan beberapa literatur untuk menjadi bahan rujukan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian pertama yang ditemukan adalah penelitian yang ditulis oleh Heri Suharyanto berjudul “Ketahanan Pangan.”<sup>55</sup> Dalam penelitiannya, ia menjelaskan sistem ketahanan pangan di Indonesia terdiri dari 4 sub-sistem, yaitu ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup untuk seluruh penduduk, distribusi pangan secara merata dan lancar, konsumsi pangan yang memenuhi gizi seimbang, dan berdampak pada status gizi masyarakat. Oleh karena itu sistem ketahanan pangan pun menyangkut pada aspek yang lebih kecil, yaitu pada tingkat rumah tangga dan individu serta status gizi anggota rumah tangga, terutama untuk anak dan ibu hamil dari rumah tangga miskin.

Lebih lanjut dalam literatur tersebut juga dijelaskan mengenai persoalan rawan pangan yang dihadapi oleh Indonesia, salah satunya terkait dengan distribusi pangan. Distribusi pangan adalah salah satu indikator ketahanan pangan, dan mendapatkan sejumlah permasalahan teknis sehingga distribusi di Indonesia mengalami sejumlah kendala. Sehingga dari tulisan tersebut penulis

---

<sup>53</sup> Iwan Hermawan, ‘Analisis Perdagangan Beras Dan Ketahanan Pangan Di Negara-Negara Asia Tenggara’, *Jurnal Politica*, 4.2 (2013), 157–96, hlm. 163.

<sup>54</sup> Reni Arlyan, ‘Hubungan Ketahanan Pangan Dan Stabilitas Keamanan Negara (Krisis Pangan Di Venezuela)’, *Jurnal Dinamika Global Hubungan Internasional*, 3.01 (2018), 108–31 <<https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jdg.v3i01.59>>.

<sup>55</sup> Heri Suharyanto, ‘Ketahanan Pangan Heri Suharyanto \* Abstrak’, *Jurnal Sosial Humaniora*, 4.2 (2011), 186–94 <<http://iptek.its.ac.id/index.php/jsh/article/view/633/355>>.

menyimpulkan bahwa distribusi pangan harus mendapatkan prioritas, karena untuk meningkatkan ketahanan pangan seluruh masyarakat secara merata harus mudah untuk mengakses pangan, hingga ke pelosok atau ke tempat dimana ladang pertanian padi bukan menjadi prioritas dari daerah tersebut. Yang tak kalah penting juga yaitu, selain konsep ketahanan pangan yang meninjau dari sisi produksi dan penyediaan pangan juga perlu berlandaskan pada kemampuan masyarakat miskin dan kurang mampu untuk dapat mengakses pangan sesuai dengan indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk tujuan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian penelitian lainnya berasal dari Reni Arlyan berjudul “Hubungan Ketahanan Pangan dan Stabilitas Keamanan Negara (Krisis Pangan di Venezuela).”<sup>56</sup> Penelitian ini menjelaskan bahwa ancaman juga datang dari kurangnya ketersediaan pangan dan dapat memicu terjadinya krisis pangan dan berakibat pada stabilitas keamanan negara. Ketahanan pangan dipahami sebagai kemampuan dasar manusia untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Sehingga sebagian besar konflik, baik itu protes kekerasan, kekerasan terhadap rakyat, dan konflik sipil terjadi pada kondisi pembangunan ekonomi yang rendah, yang berhubungan dengan kemiskinan dan ketidakamanan pangan.

Dari penelitian tersebut diketahui bahwa akses pangan harus selalu terpenuhi, karena jika tidak, akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Masyarakat yang tidak dapat mengakses kebutuhan pangan akan mengakibatkan konflik. Begitu pula yang terjadi di Venezuela, setelah mengalami krisis ekonomi, Venezuela juga dihadapi dengan masalah krisis pangan yang membuat masyarakatnya melakukan kekerasan untuk mendapatkan makanan. Masyarakat melakukan penjarahan makanan yang memicu kekerasan antar

---

<sup>56</sup> Ibid, Arlyan.

warga. Oleh sebab itu, ketahanan pangan dapat berhubungan dengan berbagai aspek dalam negara dan pada akhirnya bertujuan untuk stabilitas keamanan negara.

Kemudian penelitian ketiga berasal dari Redha Irwan Khaidir yang berjudul, “Kontribusi FAO dalam Mengatasi Masalah Ketahanan Pangan di Indonesia.”<sup>57</sup> Walaupun Indonesia merupakan negara yang agraris dan menjadi produsen beras terbesar, tetapi hingga saat ini tidak terlepas dari masalah ketahanan pangan, seperti kebutuhan pangan dan produksinya yang tidak seimbang. Keadaan seperti itu membuat Indonesia harus melakukan impor pangan untuk menjaga stok dalam negeri. Dengan begitu, Indonesia membutuhkan bantuan dari FAO dalam membantu mengatasi masalah ketahanan pangan.

Kontribusi yang diberikan FAO dalam mengatasi masalah tersebut terbagi dalam dua kategori yang dilakukan. Pertama, yaitu melalui program *National Medium-Term Priority Framework* (NMTPF), dimana program tersebut untuk membentuk kerangka kerja dalam mengidentifikasi sektor-sektor yang mana saja perlu mendapat prioritas pemerintah Indonesia. Kedua, yaitu melalui program *Technical Cooperation Project* (TCP) yang mendatangkan tenaga ahli serta perlengkapan agrikultural untuk meningkatkan produktivitas pangan. Bantuan dari FAO ini sangat membantu kondisi Indonesia yang saat itu terjadi krisis pangan global dan mencoba bangkit dari pemulihan pasca tsunami Aceh.

---

<sup>57</sup> Khaidir, Redha Irwan. 2016. ‘Kontribusi FAO Dalam Mengatasi Masalah Ketahanan Pangan Di Indonesia.’ Skripsi. Jawa Timur: Universitas Jember.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Rancangan Penelitian**

Rancangan penelitian adalah salah satu bagian terpenting dalam kegiatan penelitian. Nicholas Walliman menjelaskan bahwa, metode penelitian merupakan teknik yang digunakan untuk melakukan penelitian. Metode penelitian mewakili sejumlah alat atau instrument yang digunakan dan memberikan cara-cara untuk mengumpulkan data, memilah dan menganalisis informasi sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan penelitian.<sup>58</sup>

Menyusun rancangan penelitian merupakan salah satu bagian terpenting dalam kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif analitik, yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis dampak impor beras Vietnam pada ketahanan pangan. Penelitian ini tidak menggunakan teknik perhitungan murni, namun memanfaatkan informasi dan sumber yang telah ada sebelumnya. Penggunaan metode kualitatif ini untuk menggambarkan fakta-fakta dari kedua variabel tersebut, dimana yang menjadi variabel bebas (independen) adalah dampak impor beras dari Vietnam ke Indonesia tahun 2017-2021 akan mempengaruhi variabel terikat (dependen) dalam penelitian ini yaitu ketahanan pangan. Data yang digunakan untuk melihat dampaknya terhadap ketahanan pangan adalah berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yaitu apabila pangan tercukupi, beragam, aman, dan bergizi.

---

<sup>58</sup> Bakry, Umar Suryadi. 2016. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

### 3.2 Kehadiran Peneliti

Peneliti bertindak sebagai alat atau pengumpul data dalam penelitian ini. Data yang digunakan adalah data yang dihimpun penulis dari sumber terdahulu, seperti literatur buku, jurnal, *website* resmi Pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan impor beras dan ketahanan pangan, hingga melakukan kunjungan ke Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan. Kehadiran peneliti sangat dibutuhkan sebab ia menjadi pengumpul data, penganalisis, penafsir data, sehingga data yang dihasilkan juga dipengaruhi oleh peneliti sendiri.

### 3.3 Lokasi Penelitian

Untuk mendukung kebutuhan akan berbagai literatur, sangat penting bagi penulis untuk menggunakan teknologi untuk mengumpulkan data, antara lain perpustakaan Universitas Fajar, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan, *website* resmi dan *e-book* Badan Pusat Statistik (BPS), *website online* arsip materi digital berbagai Universitas, dan berbagai sumber yang didapat secara *online* lainnya.

### 3.4 Sumber Data

Sumber sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang sumbernya berasal dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan. Sedangkan data sekunder yang disebut juga dengan data yang sumbernya berupa catatan atau dokumen yang tersedia, atau data yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya. Sumber data yang diperoleh, seperti melalui jurnal, buku, artikel, koran dan situs-situs yang berhubungan dengan topik penelitian. Seperti halnya pada penelitian ini, laju impor beras dan indeks ketahanan pangan dokumennya dapat dilihat dari

Badan Pusat Statistik yang dapat diakses melalui *website* resmi pemerintah Indonesia.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan *Library Research*, yaitu teknik pengumpulan melalui buku, literatur dan laporan yang relevan dengan topik penelitian, atau disebut juga dengan teknik yang digunakan sebab tiap penelitian memerlukan bahan yang sumbernya berasal dari kepustakaan. Data yang dicari adalah data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik berupa data laju impor beras hingga luas lahan sawah baku di Indonesia.

Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka (*face to face*).<sup>59</sup> Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, dimana dalam pelaksanaannya peneliti mengajukan pertanyaan yang bersifat umum dan berjumlah minimal. Pertanyaan yang diajukan seputar topik umum dan berusaha untuk memfokuskan responden. Sedangkan prosesnya lebih kepada proses mendengarkan tanpa melakukan terlalu banyak interupsi pada responden.<sup>60</sup> Dalam wawancara ini, pihak yang diajak wawancara kemudian dimintai pendapat dan ide-idenya terkait topik penelitian tersebut. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*In-depth Interview*), yaitu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara mendalam bertujuan untuk memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara

<sup>59</sup> Mashud, Musta'in. 2007. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, ed. by Bagong Suyanto & Sutinah, Edisi Ketiga. Jakarta: Prenadamedia Group/

<sup>60</sup> Rijath Djatu Winardi, 'Metoda Wawancara', *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*, September 2018, 2018, 53–99.

dengan orang yang diwawancarai, baik itu dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*).<sup>61</sup> Metode *indepth interview* digunakan untuk mewawancarai Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis konten (*content analysis*) yang berusaha untuk menganalisis data-data dalam konteks tertentu atau membahas isi dari sebuah informasi tertulis atau tercetak pada media massa.

Awalnya penulis akan mengumpulkan data yang diperoleh dari kepustakaan atau informasi melalui situs *online* dan kemudian menjelaskan alasan terjadinya impor beras Indonesia walaupun Indonesia mempunyai peluang untuk menjadi negara dengan produsen terbesar dan eksportir terbesar di dunia. Adapun data awal yang diperoleh adalah penjelasan mengenai bagaimana kondisi ketersediaan beras di Indonesia pada tahun 2012-2015. Pada penelitian selanjutnya data yang akan dicari adalah data mengenai pengaruhnya terhadap ketahanan pangan.

Sedangkan untuk aspek ketahanan pangan yang pada akhirnya akan dianalisis pengaruh impor beras dari Vietnam pada kurung waktu tertentu, yaitu tahun 2017-2021 terhadap ketahanan pangan Indonesia. Terdapat tiga indikator yang akan menjelaskan kedepannya bagaimana kondisi ketahanan pangan Indonesia, yaitu aspek ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, dan pemanfaatan pangan.

---

<sup>61</sup> Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.

### 3.7 Pengecekan Validasi Data

Validitas dalam penelitian kualitatif erat kaitannya dengan ketepatan prosedur melakukan penelitian sehingga hasil penelitian dan kesimpulan penelitian tersebut dapat dipercaya sebagai suatu kebenaran umum. Dalam hal ini, validitas dilihat sebagai evaluasi untuk menentukan apakah interpretasi dan juga kesimpulan penelitian semuanya didukung oleh bukti atau data yang ada.<sup>62</sup> Pengecekan validitas data adalah reliabilitas yang merupakan derajat ketepatan antara data yang berada pada objek penelitian dengan data yang didapat oleh penulis. Reliabilitas yang digunakan yaitu keakuratan untuk melihat apakah hasil penelitian sesuai dengan kajian pustaka dan data-data yang ada.

Teknik pengecekan validasi data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Triangulasi sendiri adalah sebuah pendekatan analisis data yang menyatukan data dari berbagai sumber. Teknik ini menguji informasi dengan cara mengumpulkan data dengan metode yang berbeda. Triangulasi juga diartikan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.<sup>63</sup> Data yang dijadikan pembandingan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen atau data kepustakaan, hasil wawancara dan data dari penulis sendiri.

### 3.8 Tahap-Tahap Penelitian

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang dari judul penulis, yaitu Dampak Impor Beras Vietnam Tahun 2017-2021 Terhadap Ketahanan Pangan Indonesia. Indonesia sebagai negara agraris tetap

---

<sup>62</sup> Budiastuti, Dyah., Agustinus Bandur. 2018. *Validitas Dan Reabilitas Penelitian*, Binus. Jakarta: Mitra Wacana Media.

<sup>63</sup> Bachtiar S Bachri, 'Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif', *Teknologi Pendidikan*, 10 (2010), 46–62.

melakukan impor secara besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan sebuah negara.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis memaparkan tinjauan pustaka atau landasan teori yang menjadi dasar untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terdapat pada rumusan masalah yang sesuai dengan judul penelitian dan pembahasan.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini penulis memaparkan metode penelitian yang digunakan. Dalam bab ini metode penelitian terdiri dari rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, validitas data, dan tahap-tahap penelitian.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis memaparkan hasil penelitian yang akan memaparkan tentang rumusan masalah dari pembahasan penelitian. Dari rumusan masalah ini akan dikembangkan menjadi hasil penelitian dari judul “Dampak Impor Beras Vietnam Tahun 2017-2021 terhadap Ketahanan Pangan Indonesia.”

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini, penulis memberikan kesimpulan beserta saran dari keseluruhan bab yang ada dalam skripsi ini.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Latar Belakang Impor Beras di Indonesia Tahun 2017 – 2021

Sektor pertanian memiliki peran penting dalam mengamankan pasokan pangan bagi masyarakat Indonesia. Sedangkan sumber pangan utama bagi masyarakat Indonesia adalah beras. Dengan demikian, secara strategis sektor pertanian dapat menciptakan ketahanan pangan nasional yang juga secara tidak langsung berkaitan dengan pertahanan ketahanan pangan nasional.

Indonesia saat ini merupakan produsen beras terbesar yang menempati urutan ketiga di dunia. Bahkan menurut laporan *United States Department of Agriculture* (USDA), Indonesia menempati urutan ketiga penghasil beras terbesar setelah Tiongkok dan India dengan memproduksi 35,6 juta metrik ton beras.<sup>64</sup> Sedangkan Indonesia adalah negara pengimpor beras sejak akhir 1980-an.<sup>65</sup> Disusul oleh Bangladesh di urutan keempat, Vietnam sendiri berada pada urutan kelima dengan jumlah produksi sekitar 27,4 juta metrik ton. Data negara produsen beras di dunia lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah.

---

<sup>64</sup> 'USDA ERS - Rice Sector at a Glance' <<https://www.ers.usda.gov/topics/crops/rice/rice-sector-at-a-glance/>> [accessed 16 June 2022].

<sup>65</sup> Dian Mashithoh Azzahra, Amri Amir, and Siti Hodijah, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Impor Beras Di Indonesia Tahun 2001-2019', *E-Journal Perdagangan Industri Dan Moneter*, 9.3 (2021), 181–92 <<https://doi.org/10.22437/pim.v9i3.14642>>.

**Tabel 4.1 Daftar 10 Negara Penghasil Beras di Dunia  
Tahun 2016 – 2021**

| <b>Negara</b> | <b>Produksi rata-rata tahunan*</b> |
|---------------|------------------------------------|
| Tiongkok      | 148,032                            |
| India         | 116,016                            |
| Indonesia     | 35,612                             |
| Bangladesh    | 34,517                             |
| Vietnam       | 27,388                             |
| Thailand      | 19,327                             |
| Burma         | 12,860                             |
| Filiphina     | 11,999                             |
| Brazil        | 7,866                              |
| Jepang        | 7,711                              |

\* juta matrik ton

Sumber: USDA, *Foreign Agricultural Service, Production, Supply and Distribution database*.<sup>66</sup>

Meskipun Indonesia merupakan negara yang menempati posisi ketiga penghasil beras terbesar di dunia, namun hingga kini terdapat suatu kondisi Indonesia masih melakukan impor beras. Hal ini disebabkan karena pemerintah bertanggung jawab dalam pemenuhan pangan untuk kebutuhan masyarakatnya. Sedangkan pemenuhan pangan bersumber dari dalam dan luar negeri, yaitu melalui impor beras. Impor beras adalah kegiatan perdagangan internasional yang memasukkan komoditas barang dari luar negeri ke wilayah Indonesia. Indonesia melakukan impor beras dari negara-negara seperti, Vietnam, Thailand, Tiongkok, India, dan Pakistan. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa impor beras ke Indonesia fluktuatif dari tahun ke tahun. Impor beras tertinggi terjadi pada tahun 2011, 2012, dan 2016. Dimana impor tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebanyak 2,7 juta ton beras. Sedangkan pada

<sup>66</sup> Ibid, 'USDA ERS - Rice Sector at a Glance'.

tahun 2012, dilakukan impor beras sebanyak 1,8 juta ton. Impor beras sempat mengalami penurunan pada 2013 dengan total 472 ton, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2014 dan 2015 dengan total masing-masing yaitu 844 ton dan 861 ton. Selanjutnya mengalami peningkatan tajam pada tahun 2016 sebanyak 1,2 juta ton.<sup>67</sup> Kondisi Indonesia yang mengharuskan untuk melakukan impor beras kemudian dijelaskan di bawah ini

#### **a. Pertumbuhan penduduk**

Pertama, yaitu pertumbuhan penduduk Indonesia tiap tahunnya akan meningkatkan kebutuhan penduduk akan pangan, khususnya beras. Sebagaimana yang dinukil dari seorang ahli ekonomi klasik, yaitu Thomas Maltus menyatakan bahwa jumlah penduduk dihitung menggunakan deret hitung sedangkan makanan dihitung menggunakan deret ukur. Artinya tiap pertambahan jumlah penduduk 1 (satu) orang maka makanan harus bertambah 2 (dua) kg beras, begitu pun setiap pertambahan jumlah penduduk 2 orang maka makanan juga harus bertambah 4 kg beras, begitupun seterusnya.<sup>68</sup> Penduduk Indonesia sendiri dalam kurung waktu 10 tahun terakhir mengalami peningkatan pesat, yaitu jika dibandingkan pada tahun 2012 sejumlah 245,4 juta jiwa meningkat pesat menjadi 273 juta jiwa pada tahun 2022.<sup>69</sup> Sehingga peningkatan jumlah penduduk ini yang mendorong pemerintah Indonesia harus lebih banyak menyediakan pangan, khusus beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Namun menariknya apabila melihat jumlah konsumsi beras per tahun Indonesia tiap tahunnya mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2017 dengan

---

<sup>67</sup> Badan Pusat Statistik. 2020. 'Impor Beras Menurut Negara Asal Utama, 2000-2020', *Badan Pusat Statistik*, 2021 <<https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1043/impor-beras-menurut-negara-asal-utama->> [accessed 5 July 2022].

<sup>68</sup> Idrus Ismail, 'Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Konsumsi Beras Di Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo', *Jurnal Gorontalo Development Review*, 1.1 (2018), 74 <<https://doi.org/10.32662/golder.v1i1.117>>.

<sup>69</sup> Ibid, 2021.

total 29,13 juta ton sementara pada tahun 2019 hanya berkisar 28,69 juta ton.<sup>70</sup> Penurunan konsumsi beras ini bisa terjadi akibat pemerintah Indonesia yang gencar untuk melakukan diversifikasi pangan. Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati dengan lahan yang subur seharusnya menyediakan sumber pangan yang beragam. Oleh karena itu diversifikasi menjadi salah satu usaha untuk menyediakan beragam produk pangan untuk masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan konsumsi akan beras dan mengoptimalkan pangan lokal lain, seperti jagung sagu, dan umbi-umbian. Diversifikasi juga bertujuan untuk penguatan kedaulatan pangan nasional karena pangan pokok Indonesia bukan hanya beras tapi terdiri dari beberapa bahan pokok lainnya. Sehingga pada akhirnya *output* diversifikasi pangan ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia karena masyarakat Indonesia dapat mengakses pangan yang beragam, sumber gizi yang juga beragam dan aman.

Walaupun dari data konsumsi tersebut menunjukkan kecenderungan penurunan konsumsi beras, sementara pemerintah berusaha melakukan diversifikasi, namun terdapat budaya konsumsi yang ada di kalangan masyarakat yang menjadikan nasi sebagai pangan utama yang sangat berakar dalam budaya masyarakat dan akan sangat sulit untuk merubah kebiasaan tersebut. Nasi sudah menjadi kebiasaan dan pola hidup di masyarakat dan menjadi identitas kearifan lokal masyarakat Indonesia. Oleh karena itu seringkali kita mendengar istilah yang mengatakan “belum makan jika belum makan nasi.”<sup>71</sup> Istilah tersebut ada dalam pola pikir masyarakat dan merupakan budaya yang telah lama

---

<sup>70</sup> Badan Pusat Statistik, *Konsumsi Bahan Pokok 2019* (Badan Pusat Statistik, 2019).

<sup>71</sup> Vivit Bartoven & Yeni Kartini Nurdin, “‘Belum Makan Kalau Belum Makan Nasi’: Perspektif Sosial Budaya Dalam Pembangunan Ketahanan Pangan’, *Jurnal Sosiologi*, 19.1 (2017), 9–25.

diwariskan. Kebiasaan tersebut tentu saja diantisipasi dengan ketersediaan pangan dan menjaga stok beras agar tetap aman.

Bagaimana pun secara keseluruhan Indonesia menempati posisi keempat terbesar di dunia untuk jumlah konsumsi beras yaitu sekitar 28 juta metrik ton.<sup>72</sup> Sehingga menjadi jelas jika melihat pertimbangan pada kebiasaan makan masyarakat Indonesia dan konsumsi beras yang terbilang cukup tinggi mengharuskan Indonesia untuk tetap melakukan impor beras.

#### **b. Konversi lahan pertanian**

Faktor kedua, yaitu pengalihan atau konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Apabila lahan sawah dialihfungsikan maka lahan untuk menanam padi juga menurun. Apabila lahan untuk menanam padi menurun maka produksi akan beras juga menurun. Sedangkan peningkatan penduduk dan pesatnya pembangunan ekonomi sejalan dengan peningkatan kebutuhan lahan untuk pembangunan perumahan, pemukiman penduduk, pembangunan infrastruktur seperti jalan, tol, bandara, pelabuhan, perkantoran, dan kawasan industri.<sup>73</sup> Sedangkan laju konversi lahan sendiri apabila tidak terkendali dan terdapatnya hambatan dalam meningkatkan produktivitas padi maka menjadi salah satu faktor utama yang melemahkan program ketahanan pangan.

Diluar pembangunan infrastruktur dan pembangunan perumahan, terdapat pula alih fungsi lahan sawah untuk memperluas perkebunan kelapa sawit, seperti yang terjadi di Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur. Berkurangnya lahan sawah secara meluas di Sumatera Selatan ini juga

---

<sup>72</sup> Index Mundi, 'Milled Rice Domestic Consumption by Country in 1000 MT', 2022 <<https://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=milled-rice&graph=domestic-consumption>>.

<sup>73</sup> Anny Mulyani and others, 'Analisis Konversi Lahan Sawah : Penggunaan Data Spasial Resolusi Tinggi Memperlihatkan Laju Konversi Yang Mengkhawatirkan', *Jurnal Tanah Dan Iklim*, 40.2 (2016), 121–33 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2017/jti.v40i2.5708>>.

menimbulkan permasalahan serius karena pada areal sawah yang ada, jaringan air irigasinya menjadi terganggu disebabkan perbedaan sistem irigasi antara lahan sawah dengan irigasi perkebunan kelapa sawit. Selain itu, maraknya pengalihfungsian lahan sawah menjadi lahan perkebunan sawit juga disebabkan oleh anggapan bahwa perkebunan sawit lebih menguntungkan dan menjadi penyumbang perekonomian bagi masyarakat di daerah tersebut.<sup>74</sup> Sedangkan di Kalimantan Timur sendiri, selain alasan ekonomi yang lebih menguntungkan, masyarakat petani lebih memilih menanam kelapa sawit karena perawatannya yang mudah dan tahan terhadap kondisi panas.<sup>75</sup>

Tidak hanya itu, laju konversi lahan juga terjadi di wilayah lain di Indonesia, seperti Provinsi Jawa Barat karena akibat perkembangan pemukiman dan perkantoran, kawasan industri dan pembangunan infrastruktur. Selain Jawa Barat, konversi lahan sawah juga terjadi di hampir sebagian besar wilayah di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat yang ditujukan untuk pemukiman dan industri serta perluasan jalan. Salah satu contoh konversi lahan yang terjadi di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Apabila dibandingkan luas penggunaan lahan sawah pada tahun 2005 sebesar 3.059 ha atau sekitar 57,98% dari total luas areal Kecamatan Pallangga mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 305,25 ha dari total luas lahan penggunaan sawah pada tahun 2005. Penurunan luas lahan ini terjadi karena lahan sawah telah terkonversi menjadi lahan lain, yaitu untuk kebutuhan pemukiman akibat pertambahan jumlah penduduk. Sedangkan pertambahan

---

<sup>74</sup> Ibid, Mulyani and others.

<sup>75</sup> Dita Angga Rusiana, 'Alih Fungsi Lahan Persawahan Jadi Perkebunan Kelapa Sawit Di Penajam Paser Utara Sulit Dibendung', 2022 <<https://kaltim.inews.id/berita/alih-fungsi-lahan-persawahan-jadi-perkebunan-kelapa-sawit-di-penajam-paser-utara-sulit-dibendung>>. [Diakses tanggal 6 Agustus 2022]

jumlah penduduk dalam kurun waktu 2005 – 2015 di Kecamatan Pallangga mengalami kenaikan hampir mencapai 50% atau bertambah sebanyak 38.843 jiwa penduduk.<sup>76</sup> Konversi lahan sawah ini umumnya terjadi pada wilayah sekitar urban. Selain Kecamatan Pallangga yang menjadi wilayah peri urban karena berbatasan langsung dengan Kota Makassar yang terus berkembang, wilayah peri urban seperti Kabupaten Bogor, Tangerang, Bandung, Sidoarjo, dan Bekasi juga mengalami konversi lahan.<sup>77</sup>

Beberapa provinsi seperti Jawa Barat dan Jawa Timur memiliki laju konversi tertinggi yaitu lebih dari 16.000 ha th<sup>-1</sup>, sementara itu Sumatera Selatan menjadi provinsi urutan ketiga dengan laju konversi 6.926 ha th<sup>-1</sup>, diikuti Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan. Apabila dihitung secara nasional perkiraan laju konversi lahan sawah sekitar 96.512 ha th<sup>-1</sup>. Besarnya laju konversi yang hampir mencapai 100.000 ha ini mengancam ketahanan pangan nasional Indonesia. Apabila lahan sawah dikonversi menjadi lahan non-pertanian secara massif dilakukan, maka akan mengancam penurunan produksi padi yang pada akhirnya akan memberikan sinyal bagi pemerintah untuk melakukan impor beras.

Pada kenyataannya, konversi lahan sawah ini tidak dapat dihindari akibat jumlah penduduk tinggi serta kegiatan pembangunan yang terus berlangsung dilakukan oleh pemerintah sebuah negara. Sebab pembangunan ekonomi sebuah negara membutuhkan lahan yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, kawasan industri, dan kegiatan non-pertanian lainnya. Sementara

---

<sup>76</sup> Magfirah Djamaluddin, Andi Ramlan, and Muh. Jayadi, 'Monitoring Perubahan Areal Persawahan Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus: Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa)', *Jurnal Ecosolum*, 8.1 (2019), 1 <<https://doi.org/10.20956/ecosolum.v8i1.6892>>.

<sup>77</sup> Ibid, Mulyani and others.

laju pertumbuhan penduduk pun menambah permintaan akan pembangunan perumahan (*real estate*).

### c. Stabilisasi melalui stok beras

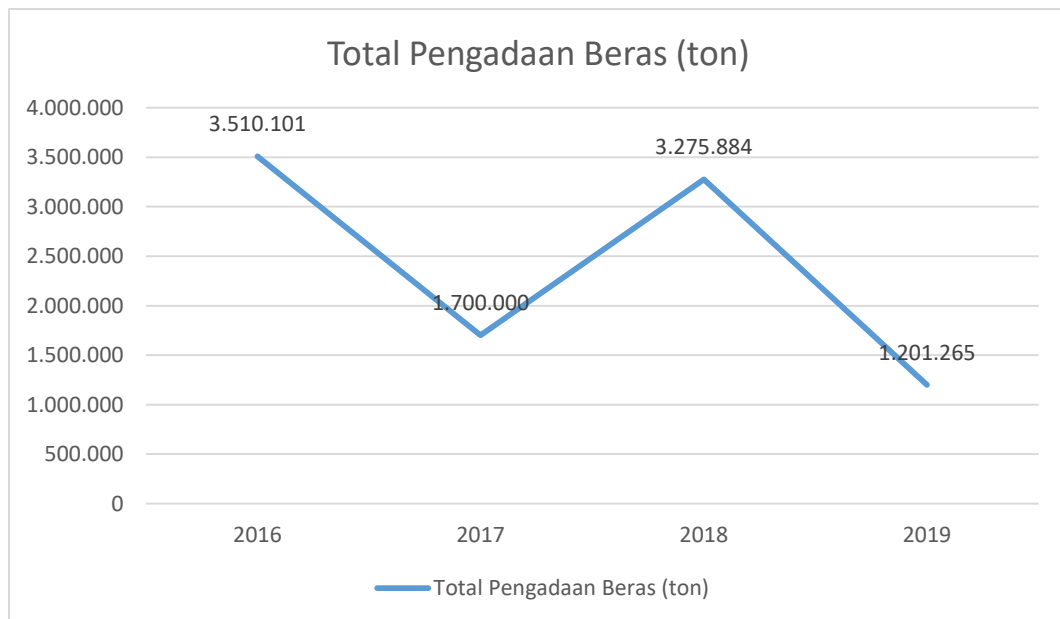
Faktor selanjutnya yang dinilai cukup berpengaruh untuk mencapai ketahanan pangan yaitu dengan stabilisasi pasokan. Stabilisasi pasokan dilakukan dengan upaya untuk menjaga stok beras. Lembaga pemerintah Indonesia yang bertugas dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan adalah Badan Urusan Logistik (BULOG), yang dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perum BULOG dalam rangka ketahanan pangan.<sup>78</sup>

Stok beras nasional penting untuk menjaga keseimbangan dan ketersediaan pasokan beras domestik. Menurut Badan Pangan Dunia (FAO) stok beras suatu negara idealnya adalah sekitar 17-18 persen dari total kebutuhan konsumsi beras. Sedangkan jika mengikuti rumus *stock-to-use ratio* (SUR), maka kebutuhan akan stok beras nasional sebesar 5,17 juta ton.<sup>79</sup> Untuk pengelolaan stok beras sendiri, pengadaan beras yang diatur oleh BULOG berasal dari pengadaan dalam negeri maupun luar negeri. Adapun total pengadaan beras baik dari dalam negeri dan luar negeri untuk stok beras yang dikelola oleh Perum BULOG dapat dilihat melalui grafik 4.1 di bawah.<sup>80</sup>

<sup>78</sup> Peraturan Presiden (Perpres), *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional*, 2016.

<sup>79</sup> Nono Rusono, 'Kebijakan Penguatan Pengelolaan Stok Beras Pemerintah Strengthening Policy on Government Rice Stock Management', *Jurnal Pangan*, 28.3 (2019), 227–38.

<sup>80</sup> Perum Bulog, *2019 Annual Report at a Glance*, 2019.

**Grafik 4.1 Total pengadaan beras (ton)**

Sumber: Perum BULOG *Annual Report 2019*<sup>81</sup>

Dari grafik 4.1 di atas total pengadaan beras untuk stok beras pada tahun 2016 sebesar 3,51 juta ton lalu mengalami penurunan pada tahun 2017 yaitu tersisa 1,7 juta ton. Kemudian pada tahun 2018 sebanyak 3,27 juta ton dan kembali menurun secara drastis pada tahun 2019 dengan total hanya 1,2 juta ton.<sup>82</sup> Pengadaan beras untuk stok beras ini tidak pernah mencapai target yang ditentukan oleh FAO dan bahkan pengadaan beras ini terus mengalami penurunan.<sup>83</sup>

Namun bagi BULOG sendiri mereka mengatakan stok beras aman apabila memenuhi stok sebanyak 1 juta ton beras di gudang BULOG. Terlebih lagi jika masa panen akan tiba, maka BULOG juga perlu menyerap beras dari petani. Apabila beras di gudang BULOG penuh, BULOG melakukan ekspor ke

<sup>81</sup> Ibid, 2019.

<sup>82</sup> Ibid, 2019.

<sup>83</sup> Ibid, Rusono, hlm.5.

luar daerah pada wilayah yang defisit produksi beras. Stok beras pada tahun 2018 yang melebihi batas aman yang melebihi 1 juta ton di Perum BULOG juga menjadi alasan mengapa untuk beberapa tahun terakhir impor beras yang dilakukan cenderung rendah dan tidak pernah mencapai impor 1 juta ton beras.

Pemberlakuan impor beras ke Indonesia memiliki tujuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras Pasal 1 yang menyebutkan bahwa impor beras untuk keperluan umum adalah impor beras sebagai cadangan yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan oleh Pemerintah untuk keperluan antara lain stabilitas harga, penanggulangan keadaan darurat, masyarakat miskin, kerawanan pangan, dan keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.<sup>84</sup>

Sehingga cukup jelas bahwa Indonesia melakukan impor beras hanya untuk memenuhi stok beras yang sekali-kali dapat berguna untuk menstabilkan harga, keadaan darurat, dan masyarakat miskin melalui program bantuan sosial. Untuk program bantuan, khususnya program raskin (beras untuk keluarga miskin) walaupun pemerintah daerah menolak beras yang disalurkan berasal dari impor luar negeri, namun apabila kekurangan stok beras lokal yang tersedia untuk penyaluran bantuan, beras impor bisa menjadi pilihan terakhir untuk penyaluran program tersebut. Bahkan sesuai dengan literatur yang dikutip pada bab dua sebelumnya, menjelaskan bahwa apabila volume raskin yang didistribusikan besar maka semakin tinggi pula resiko pemerintah untuk mengimpor beras, sehingga volume raskin yang disarankan hanya berkisar 2 juta ton per tahun untuk menghindari tingginya permintaan akan impor beras.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Ibid, Menteri Perdagangan Republik Indonesia.

<sup>85</sup> Ibid, Sawit.

Lebih lanjut impor beras juga ditujukan untuk menstabilkan harga beras. Hal ini sesuai dengan penelitian sudah disebutkan pada bab sebelumnya yang menemukan bahwa harga beras di pasaran domestik berpengaruh baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap impor beras. Dengan kata lain apabila terjadi kenaikan harga beras dalam negeri maka pemerintah Indonesia berusaha menciptakan situasi *excess supply* dengan melakukan impor agar harga beras turun.<sup>86</sup> Bahkan stabilitas harga dengan impor beras juga sesuai dengan penelitian oleh Onu D.O yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara volume impor beras dengan harga beras domestik, yaitu indikasi bahwa impor beras meningkat apabila harga beras domestik juga mengalami kenaikan. Lebih tinggi harga beras domestik, maka konsumen atau masyarakat akan membayar lebih akan hal itu. Fenomena seperti itu akan membuat tingginya permintaan beras sehingga pemerintah akan melakukan impor beras untuk memenuhi permintaan dalam negeri.<sup>87</sup>

Perkembangan impor beras di Indonesia bisa dilihat dari kisaran stok beras yang tersedia dalam negeri. Sempat mengalami penurunan tajam pada tahun 2017 dengan total impor beras sekitar 305 ribu ton,<sup>88</sup> keran impor yang dibuka hanya diperuntukkan untuk beras premium saja seperti kebutuhan untuk industri makanan dan restoran tertentu di Indonesia yang bernuansa Timur Tengah.<sup>89</sup> Beras yang diimpor termasuk diantaranya adalah beras basmati yang tidak diproduksi dalam negeri, japonica, dan jasmine.<sup>90</sup>

---

<sup>86</sup> Ibid, Abrar.

<sup>87</sup> Ibid, Onu, Simonyan, and Onyenweaku.

<sup>88</sup> Badan Pusat Statistik. 'Impor Beras Menurut Negara Asal Utama, 2000-2020'. 2021 <<https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1043/impor-beras-menurut-negara-asal-utama-2000-2021.html>> [accessed 20 July 2022]

<sup>89</sup> Ibid, Fauzi.

<sup>90</sup> Muhammad Choirul Anwar, 'Jokowi Sebut Hampir 3 Tahun Tak Impor Beras, Benarkah?', 2021 <<https://money.kompas.com/read/2021/03/27/082824826/jokowi-sebut-hampir-3-tahun-tak-impor-beras-benarkah?page=all>> [accessed 20 July 2022].

Stok beras di Perum BULOG pada awal tahun 2017 berada dalam kondisi aman, yaitu mencapai 1,7 juta – 1,8 juta ton.<sup>91</sup> Sedangkan patokan untuk menentukan stok beras aman yang disimpan oleh Perum BULOG adalah 1 juta ton.<sup>92</sup> Bahkan di beberapa daerah dengan surplus produksi beras seperti di Jawa Tengah dan Jawa Barat mengalami kelebihan stok di gudang BULOG. Sehingga kelebihan stok beras itu dikirim ke luar pulau Jawa, seperti di Sumatera dan Kalimantan.<sup>93</sup> Stok yang berlimpah di gudang BULOG serta tambahan beras di waktu musim panen menunjukkan produksi beras pada tahun tersebut baik. Keputusan untuk impor beras jenis umum pun dirasakan tidak perlu dilakukan karena produksi beras yang surplus dan stok beras memenuhi pada saat itu.

Namun impor beras Indonesia kembali meningkat drastis pada tahun 2018 dengan total 2,2 juta ton beras.<sup>94</sup> Hal tersebut disebabkan oleh sederet peristiwa yang mewarnai pengambilan keputusan oleh pemerintah untuk mengimpor beras dari luar negeri. Awal mula terjadinya yaitu pada Januari 2018 ketika harga beras di beberapa titik wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah naik.<sup>95</sup> Sehingga direspon langsung oleh Menteri Perdagangan pada saat itu yaitu Enggar untuk melakukan impor beras sebanyak 500 ribu ton dengan dalih tidak ingin mengambil resiko kekurangan pasokan, padahal produksi beras sepanjang tahun 2018 terbilang tinggi apabila dibandingkan

---

<sup>91</sup> Ibid, Deny.

<sup>92</sup> Perum Bulog, 'Bulog: Stok Beras Nasional Aman Capai 1 Juta Ton', 2021 <<http://www.bulog.co.id/2021/03/28/bulog-stok-beras-nasional-aman-capai-1-juta-ton/>> [accessed 20 July 2022].

<sup>93</sup> Fadhly Fauzi Rachman, 'Mentan: Stok Beras 2017 Aman', 2017 <<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3412028/mentan-stok-beras-2017-aman>> [accessed 20 July 2022].

<sup>94</sup> Ibid, Badan Pusat Statistik.

<sup>95</sup> Ariyani Yakti Widyastuti, 'Begini Perjalanan Polemik Impor Beras Sejak Awal 2018', 2018 <<https://bisnis.tempo.co/read/1128490/begini-perjalanan-polemik-impor-beras-sejak-awal-2018>> [accessed 20 July 2022].

produksi pada tahun-tahun berikutnya, yaitu berkisar 33 juta ton beras.<sup>96</sup> Alasan untuk mengimpor lebih banyak beras juga disebabkan stok beras di gudang BULOG pada akhir tahun 2017 kurang dari 1 juta ton. Sehingga pada rapat koordinasi Kemenko Perekonomian yang dihadiri oleh Kementerian Perdagangan, BULOG, Kementerian Pertanian, dan Badan Pusat Statistik sepakat untuk menetapkan kuota impor tahun 2018 menjadi 2 juta ton.

Produksi beras pada tahun 2019 adalah sebanyak 31,3 juta ton.<sup>97</sup> Tingginya impor beras yang mencapai 2,2 juta ton pada tahun 2018 menyebabkan stok cadangan beras pemerintah pada tahun 2019 masih mencukupi dan bahkan hingga saat ini terdapat 200 ribu ton beras sisa impor tahun 2018 berada di gudang BULOG.<sup>98</sup> Berdasarkan laporan tahunan Perum BULOG tahun 2019, stok setara beras yang dikelola BULOG pada akhir tahun 2019 bahkan sejumlah 2.018.880 ton, dimana 1.877.391 ton adalah stok cadangan beras pemerintah dan 141.489 ton adalah untuk stok komersial. Stok cadangan beras pemerintah ini cukup untuk memenuhi kebutuhan rata-rata penyaluran selama 12 bulan.<sup>99</sup> Ketahanan stok beras BULOG yang mencapai 12 bulan penyaluran ini juga didukung oleh adanya penugasan impor beras oleh pemerintah pada tahun 2018 lalu. Kondisi ini menjadi salah satu alasan mengapa kuota impor beras cenderung rendah bahkan berlaku untuk tahun 2020 dan tahun 2021.

---

<sup>96</sup> Viva Budy Kusnandar, 'Berapa Produksi Beras Indonesia Pada 2021?', 2022 <[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/02/berapa-produksi-beras-indonesia-pada-2021#:~:text=Produksi Beras Indonesia \(2018-2021\)&text=Badan Pusat Statistik \(BPS\) mencatat,31%2C36 juta ton beras.](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/02/berapa-produksi-beras-indonesia-pada-2021#:~:text=Produksi Beras Indonesia (2018-2021)&text=Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat,31%2C36 juta ton beras.)> [accessed 24 June 2022].

<sup>97</sup> Ibid, Kusnandar.

<sup>98</sup> Vadhia Lidyana, '106.000 Ton Beras Impor 2018 Terancam "Busuk" Di Gudang Bulog', 2021 <<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5507716/106000-ton-beras-impor-2018-terancam-busuk-di-gudang-BULOG>> [accessed 21 July 2022].

<sup>99</sup> Ibid, *Annual Report at a Glance*.

Mulai tahun anggaran 2017 pemerintah Indonesia mengubah program Beras Sejahtera (Rastra) yang selama ini memberikan bantuan 10 kg beras/bulan kepada masyarakat penerima menjadi Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Program ini memberikan bantuan pada penerima sebesar Rp.110.000,- per bulan untuk ditukar menjadi telur dan/atau beras di agen *e-warong*.<sup>100</sup> Selain itu, kepemimpinan Budi Waseso (Buwas) selaku Direktur Utama BULOG juga menyebabkan konstelasi kepentingan berubah. Perlu diingat bahwa setiap aktor memiliki kepentingan yang berbeda dengan aktor lain yang kemudian ditransformasikan menjadi sebuah kebijakan. Buwas yang cenderung menolak impor beras dan beberapa kali terlibat konflik dengan Kementerian terkait dalam hal impor beras juga mempengaruhi pengambilan keputusan untuk pengadaan beras impor.

Upaya Buwas untuk menolak impor beras dilakukan dengan tidak membuka impor beras jenis umum, dan perlu diingat juga bahwa BULOG adalah satu-satunya badan pengelola beras yang diizinkan untuk membuka keran impor beras jenis umum. Sehingga walaupun Kementerian Perdagangan memberikan izin dan membuka keran impor beras namun apabila BULOG menolak maka impor beras untuk beras jenis umum tidak akan dilakukan. Upaya kedua yang dilakukan oleh Buwas adalah dengan meningkatkan produktivitas dalam negeri serta memaksimalkan serapan gabah petani. Upaya ketiga juga dilakukan dengan rencana untuk melakukan ekspor beras pada saat panen raya. Hal tersebut dilakukan agar pada saat panen raya, harga beras tidak anjlok yang bisa menyebabkan kerugian kepada petani.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Benny Rachman, Adang Agustian, and Wahyudi, 'Efektivitas Dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)', *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, 16.1 (2018), 1 <<https://doi.org/10.21082/akp.v16n1.2018.1-18>>.

<sup>101</sup> Ibid, Kusumah.

Kebijakan mengubah program Rastra yang memberikan 10 kg beras/bulan menjadi BPNT dan bagaimana Dirut BULOG yang kontra terhadap impor beras menjadi sekian dari alasan mengapa impor beras yang dilakukan hanya dalam skala kecil selama beberapa tahun terakhir ini. Pendistribusian beras dalam program BPNT bukan lagi melalui BULOG, yang menyebabkan menurunnya pendistribusian beras dari BULOG.<sup>102</sup> Bahkan beras sisa impor pada tahun 2018 pun masih menumpuk dan tersisa banyak, serta adanya pilihan untuk membeli bahan pangan diluar beras seperti telur melalui BPNT membuat stok beras yang tersedia masih banyak tersedia di gudang BULOG.

Perlu diingat bahwa walaupun di gudang Perum BULOG beras tersedia dan stok beras termasuk aman namun karena adanya beberapa pertimbangan seperti apabila beras tersimpan terlalu lama maka beras tersebut terancam rusak yang oleh karena itu tidak dapat dikonsumsi dan didistribusikan. Atas dasar pertimbangan tersebut, pemerintah Indonesia tetap melakukan impor beras walaupun total impor yang dilakukan cenderung rendah, yaitu berada di bawah 1 juta ton beras.

#### **4.2 Kondisi Impor Beras Vietnam ke Indonesia Tahun 2017 – 2021**

Vietnam adalah salah satu negara pengekspor beras untuk Indonesia. Vietnam dalam perjalanannya menuju negara eksportir beras terbesar melalui proses yang panjang berkaitan dengan kebijakan perberasan dalam negerinya. Hal ini dimulai sebelum tahun 1989 terkait dengan harga komoditas beras, Vietnam menerapkan sistem harga ganda yang terbagi atas dua, yaitu harga resmi dan harga pasar. Harga resmi adalah harga beras saat produsen menjual beras ke negara, yang harganya jauh lebih kecil dari harga pasar yang berlaku.

---

<sup>102</sup> Yusup Rachmat Hidayat, 'Distribusi Beras Bulog Pasca Bansos Rastra Dan Bantuan Pangan Non Tunai', *Jurnal Logistik Indonesia*, 2.2 (2019), 1–14 <<https://doi.org/10.31334/jli.v2i2.293>>.

Namun pada tahun 1988 harga resmi dihapus sehingga pada tahun yang sama harga pasar beras menjadi meningkat lebih tajam dan membuat produksi beras pada tahun 1989 meningkat sebanyak 12 persen dalam jangka setahun.<sup>103</sup>

Kebijakan lain yang membuat Vietnam surplus beras adalah mereka tidak mengenakan pajak ekspor langsung. Selain itu pemerintah Vietnam juga membuat kebijakan yang pro petani, yakni menyediakan lahan yang dapat digunakan oleh para petani dan masyarakat yang tergolong miskin tanpa dibebankan sewa tanah yang berlangsung sejak tahun 2001. Kedua, pemerintah Vietnam juga memberikan jaminan dengan mematok tingkat keuntungan tertentu bagi petani dengan cara membeli beras yang dijual di pasar jika harganya sewaktu-waktu jatuh. Ketiga, bahkan sejak tahun 2001 juga mendukung petani dan pedagang beras dengan membuat kebijakan pemberian subsidi bunga pinjaman.<sup>104</sup>

Lebih lanjut kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Vietnam yang pro petani dan ditujukan untuk peningkatan produksi beras juga menerapkan bebas pajak atau subsidi untuk impor benih, kebijakan pajak yang kecil untuk impor pupuk dan peptisida, reservasi lahan irigasi dan investasi publik pada pembangunan sarana dan prasaranan irigasi.<sup>105</sup> Dari sederet kebijakan tersebut Vietnam berkembang dari negara yang awalnya kekurangan pangan mampu menjadi negara eksportir beras terbesar di dunia. Dalam sejarahnya, Vietnam mulai mengekspor beras pada tahun 1989 dan menjadi salah satu dari tiga

---

<sup>103</sup> Dina Srirahayu, 'Upaya Memperkuat Posisi Beras Vietnam Di Pasar Global Melalui Branding', *Jurnal Kajian Wilayah*, 11.1 (2020), 51 <<https://doi.org/10.14203/jkw.v11i1.831>>.

<sup>104</sup> Achmad Suryana and Ketut Kariyasa, 'Ekonomi Padi Di Asia: Suatu Tinjauan Berbasis Kajian Komparatif', *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 26.1 (2016), 17 <<https://doi.org/10.21082/fae.v26n1.2008.17-31>>.

<sup>105</sup> Agus Dwi Nugroho, Jamhari Jamhari, and Jangkung Handoyo Mulyo, 'Dinamika Perdagangan Beras Vietnam', *Jurnal Agro Ekonomi*, 2017, 50 <<https://doi.org/10.22146/agroekonomi.17697>>.

eksportir beras terbesar saat itu. Bahkan hingga saat ini apabila dilihat dari data *Index Mundi* tahun 2022, Vietnam menempati urutan ketiga untuk ekspor beras terbesar di dunia dengan total jumlah 6,4 juta metrik ton beras.<sup>106</sup>

Vietnam mampu memproduksi beras dalam jumlah yang banyak karena terdapat lahan yang tersedia, sumber daya air yang memadai dengan biaya produksi yang relatif rendah. Karena biaya produksi yang rendah tersebut Vietnam dapat memenuhi permintaan beras dari negara-negara pengimpor termasuk Indonesia dan menjual berasnya dengan harga yang relatif rendah.

Pemenuhan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya menjadi tanggung jawab bagi pemerintah. Namun di samping itu, stok beras juga harus tersedia untuk keadaan darurat seperti bencana alam, konflik sosial, dan fluktuasi harga. Sehingga untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia dalam hal pemenuhan stok beras melakukan kerjasama perdagangan beras dengan Vietnam.

Indonesia dan Vietnam sebelumnya pernah menjalin kerjasama perdagangan beras yang dituangkan dalam *MoU on Rice Trade* pada tahun 2005 dan kemudian melanjutkan kerjasama tersebut hingga tahun 2017. Dalam perjanjian tersebut Vietnam bersiap untuk memasok 1 hingga 1,5 juta ton beras ke Indonesia setiap tahunnya. MoU yang ditandatangani ini memiliki tujuan untuk jaminan suplai kebutuhan beras dalam negeri hingga 1 - 1,5 juta ton setiap tahun apabila terjadi kekurangan stok beras dalam negeri. Rencana dalam kerjasama impor beras ini sebagai pemenuhan cadangan stok beras nasional agar ketahanan pangan Indonesia dapat tercapai.

---

<sup>106</sup>Index Mundi, 'Milled Rice Exports by Country in 1000 MT', 2022 <<https://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=milled-rice&graph=exports>>. [Diakses tanggal 5 Agustus 2022]

Untuk urusan perdagangan beras Vietnam baik dalam yang dilakukan dalam negeri maupun untuk ekspor dilakukan oleh dua perusahaan yaitu Vinafood I (Vietnam Northern Food Corporation/VNF-1) di Hanoi dan Vinafood II<sup>107</sup> (Vietnam Southern Food Corporation/VNF-II) di Ho Chi Minh. BULOG melalui mandat dari Menteri Perdagangan lalu membeli beras impor dari kedua perusahaan tersebut, yaitu pada 2018 lalu sebanyak 70.000 ton dari Vinafood I dan 71.000 ton berasal dari Vinafood II.<sup>108</sup> Vietnam adalah negara dengan total impor beras terbanyak yang masuk ke Indonesia. Sejak tahun 2000 total impor beras dari Vietnam ke Indonesia sebanyak 8,8 juta ton. Total impor beras tertinggi dari Vietnam terjadi pada tahun 2018 mencapai 767 ribu ton, dan menurun drastis pada tahun 2019 dan tahun 2020 yang hanya berkisar 33,133 ton dan 88.716 ton saja.<sup>109</sup>

---

<sup>107</sup> Vinafood II memiliki pabrik pengolahan beras dan memiliki kapasitas tahunan sebesar 3 juta ton untuk eksportnya. Pabriknya pun sebagian besar terletak di Delta Mekong yang menjadi wilayah lumbung padi Vietnam.

<sup>108</sup> Samuel Pablo, 'Bulog Setujui Impor 346.000 Ton Beras Dari 8 Perusahaan', 2018 <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20180122115016-4-2139/BULOG-setujui-impor-346000-ton-beras-dari-8-perusahaan>> [accessed 5 July 2022].

<sup>109</sup> Ibid, Badan Pusat Statistik.

**Grafik 4.2 Impor beras Vietnam ke Indonesia tahun 2017-2020**

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

\*ton

Selain didukung oleh adanya kerjasama perdagangan antara kedua negara, yang mengharuskan Vietnam bersedia memenuhi beras Indonesia sebanyak 1 hingga 1,5 juta ton setiap tahun, faktor lain yang menyebabkan Vietnam menjadi mitra untuk pemenuhan beras dalam negeri adalah harga berasnya yang murah. Tabel berikut merupakan perbandingan harga beras per kilogram yang ada di negara-negara di Asia Tenggara.

**Tabel 4.2 Perbandingan harga beras per kilogram (Rp) di negara-negara Asia Tenggara tahun 2018**

| <b>Negara</b> | <b>Harga Beras per Kilogram (Rp)</b> |
|---------------|--------------------------------------|
| Vietnam       | Rp. 10,571,-/kg                      |
| Indonesia     | Rp. 12,700,-/kg                      |
| Filiphina     | Rp. 12,700,-/kg                      |
| Malaysia      | Rp. 13,300,-/kg                      |
| Thailand      | Rp. 16,428,-/kg                      |
| Singapura     | Rp. 29,428,-/kg                      |

Sumber: *Numbeo*<sup>110</sup>

Dari laporan situs basis data global pada tahun 2018, *Numbeo*<sup>111</sup> mengeluarkan perbandingan harga beras dari berbagai negara di Asia Tenggara. Dari negara-negara Asia Tenggara lainnya, Vietnam adalah negara dengan rata-rata harga beras termurah yang hanya mematok Rp.10.571 per kilogramnya. Sedangkan harga beras Filiphina sama dengan harga beras Indonesia yaitu Rp.12.700 per kilogram. Kemudian harga beras Thailand juga lebih mahal dari Vietnam maupun Indonesia yakni Rp.16.428 per kilogram. Maka dari itu, adanya kerjasama yang dilakukan antara kedua negara dan harga beras Vietnam yang cenderung murah membuat Pemerintah Indonesia membeli beras Vietnam untuk memenuhi beras dalam negeri.

Pemerintah Indonesia membuka keran impor beras pada tahun 2018, dimana ada sekitar lebih dari 700 ribu ton beras diimpor dari Vietnam. Kebijakan impor beras pada dasarnya dilakukan untuk menambah stok beras. Pada tahun 2018, produksi beras mencapai sekitar 32,4 juta ton dengan konsumsi beras

<sup>110</sup> Dedhez Anggara, 'Mendag Akan Impor Beras 500 Ribu Ton, Ini Perbandingan Harga Beras di Asean', 2018 <<https://www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2018-01-15/mendag-akan-impor-beras-500-ribu-ton-ini-perbandingan-harga-beras-di-asean>>.

<sup>111</sup> Numbeo adalah basis data kontribusi pengguna terbesar di dunia tentang kota dan negara di seluruh dunia. Numbeo memberikan informasi terkini tentang kondisi kehidupan dunia termasuk biaya hidup, indikator perumahan, perawatan kesehatan, lalu lintas, kejahatan dan polusi.

mencapai 29,6 juta ton.<sup>112</sup> Adanya produksi beras sebesar 32,4 juta ton, sehingga apabila dihitung selisihnya dengan konsumsi masyarakat stok beras mencapai sekitar 2,8 juta ton.

Impor beras ke Indonesia pada tahun 2018 yang mencapai 2,2 juta ton beras membuat stok beras mencukupi di dalam negeri. Sehingga pada tahun berikutnya pemerintah Indonesia tidak melakukan impor untuk beras umum dan hanya mengimpor jenis beras tertentu. Dari total 444,508 ton beras yang diimpor Indonesia pada tahun 2019, 33 ribu diantaranya didatangkan dari Vietnam. Justru beras impor terbanyak yang didatangkan berasal dari Pakistan untuk memenuhi permintaan dari restoran asing tertentu, seperti kebutuhan akan beras basmati.

Begitu pula pada tahun 2020, angka impor beras ke Indonesia kembali menurun. Disamping akibat produksi dan stok yang masih dikatakan aman bagi pemerintah Indonesia, adanya perubahan program Raskin menjadi BPNT membuat penyebaran beras sedikit menurun. Jika sebelumnya pemerintah Indonesia harus memberikan bantuan beras sebanyak 10 kg per bulan bagi penerima bantuan sosial. Ini menjadi berbeda pada program BPNT yaitu diberikan dana sebanyak Rp.110.000 dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan/atau telur sesuai keinginan penerimanya. Hal ini tentu berarti stok beras di gudang BULOG akan lambat penyalurannya akibat adanya alternatif pilihan lain kepada masyarakat.

Sejak tahun 2019 – 2020 impor beras dari Vietnam ke Indonesia mengalami penurunan dan hal tersebut berarti bahwa impor beras dari Vietnam tidak begitu signifikan dampaknya pada ketahanan pangan Indonesia. Jenis

---

<sup>112</sup> 'BPS: Produksi Beras RI Hanya 32,4 Juta Ton Di 2018 - Bisnis Liputan6.Com' <<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3673791/bps-produksi-beras-ri-hanya-324-juta-ton-di-2018>> [accessed 4 July 2022].

beras yang diimpor pun bukan termasuk beras konsumsi harian namun beras tertentu yang tidak ditanam dalam negeri atau hanya dapat memproduksi beras tertentu dalam skala kecil. Beberapa jenis beras yang diimpor dari Vietnam antara lain, beras basmati, *broken rice* (beras menir), beras ketan yang kebutuhannya hanya untuk *moment-moment* tertentu, seperti pada saat Lebaran saja.

Keadaan seperti ini sebenarnya sudah bisa menjelaskan bahwa pada dasarnya pada tahun 2017 hingga 2021 produksi beras Indonesia mencukupi kebutuhan beras domestik dan impor beras baru dilakukan untuk mencukupi kebutuhan stok cadangan beras.

#### **4.3 Dampak Impor Beras dari Vietnam Tahun 2017-2021 Terhadap Ketahanan Pangan Indonesia**

Sesuai dengan teori keunggulan komparatif apabila dikaitkan dengan impor beras Vietnam ke Indonesia menunjukkan bahwa Vietnam dalam hal produksi beras memiliki keunggulan komparatif yang tinggi. Beras Vietnam memiliki keunggulan pada biaya produksi yang rendah dengan produksi beras yang tinggi sehingga harga beras yang diperdagangkan juga rendah. Hal tersebut juga didukung oleh produktivitas padi Vietnam yang mencapai 5,57 ton per hektar lebih tinggi dari produktivitas padi Indonesia yang hanya 5,08 ton per hektar. Sebaliknya Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang rendah dalam produksi berasnya. Ini bisa dilihat dari harga beras yang ditawarkan Vietnam jauh lebih murah dan ketersediaan beras yang melimpah sehingga Indonesia mengimpor beras dari Vietnam. Walaupun kedua negara sama-sama memproduksi beras namun karena perbedaan keunggulan komparatif tersebutlah menjelaskan kedua negara kemudian melakukan aktivitas perdagangan internasional.

Melalui perdagangan internasional yang dilakukan antar Indonesia dan Vietnam membantu meningkatkan ketersediaan akan stok beras Indonesia. Oleh Jennifer Clap juga menyebut pasokan makanan yang besar berarti ketersediaan dan harga pangan lebih rendah yang pada akhirnya meningkatkan ketahanan pangan.<sup>113</sup> Sementara itu, perdagangan yang dijalin melalui *MoU on Rice Trade* menghapuskan hambatan perdagangan antar kedua negara sehingga memudahkan dalam proses perniagaan beras oleh kedua negara.

Sederhananya, Vietnam menspesialisasikan beras sebagai keunggulan komparatifnya, sehingga spesialisasi ini menghasilkan produksi beras yang besar. Karena pasokan beras besar dan diperdagangkan secara bebas termasuk ke Indonesia, maka *outputnya* ketersediaan dan akses besar untuk Indonesia serta harga lebih murah untuk dibeli oleh pemerintah Indonesia. Dan bagi Indonesia dapat membantu memperkuat ketahanan pangan dalam negeri dalam hal pemenuhan stok beras. Atas dasar pernyataan inilah penulis melihat bahwa dampak yang ditimbulkan oleh impor, khususnya pada tahun 2019-2021 dimana produksi dalam negeri mencukupi sedangkan impor yang dilakukan dalam skala kecil dengan beras yang diimpor juga adalah jenis khusus, dipandang positif oleh penulis karena pemenuhannya hanya diperuntukkan pada cadangan stok beras.

Dalam hubungan internasional, ketahanan pangan termasuk dalam isu yang memiliki pengaruh langsung terhadap keberlangsungan hidup manusia dalam hal pangan. Melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar manusia termasuk pangan adalah bagian dari hak asasi setiap individu. Ketahanan pangan yang terjamin dapat membentuk sumber daya manusia yang baik yang pada akhirnya dapat melaksanakan pembangunan nasional, serta menjadi

---

<sup>113</sup> Ibid, Clapp.

prasyarat untuk pemenuhan hak-hak dasar lainnya seperti pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain.<sup>114</sup>

Mengingat pentingnya dalam memenuhi kecukupan pangan membuat setiap negara mengutamakan pembangunan ketahanan pangannya sebagai pondasi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya. Termasuk Indonesia dalam pembangunan ketahanan pangan berfokus pada jaminan ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, dan seimbang baik itu di tingkat rumah tangga, daerah, hingga nasional sepanjang waktu dan merata.<sup>115</sup>

Jaminan terpenuhinya pangan bagi rakyatnya yang diwujudkan dari komitmen negara-negara di dunia tertuang dalam beberapa konvensi internasional, seperti di dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1949 yang menyatakan bahwa hak atas pangan tidak terpisahkan dari hak asasi manusia, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 25 deklarasi tersebut.<sup>116</sup> Lebih lanjut dalam *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* tahun 1966 juga mengakui hak setiap individu atas kecukupan pangan dan mengakui hak dasar setiap manusia untuk terbebas dari kelaparan yang dalam kovenan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 11.<sup>117</sup>

Pemenuhan pangan dalam rangka mencapai ketahanan pangan juga tidak terlepas dari perdagangan internasional. Pada era perdagangan bebas saat ini, sektor pertanian dan komoditas pangan diwarnai dengan isu liberalisasi

---

<sup>114</sup> Dewan Ketahanan Pangan, 'Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010 – 2014', *Dewan Ketahanan Pangan*, Maret, 2011, i–161.

<sup>115</sup> Ibid, Dewan Ketahanan Pangan.

<sup>116</sup> United Nations, 'Universal Declaration of Human Rights' <<https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>> [accessed 18 July 2022].

<sup>117</sup> United Nations, 'International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights', December 1966, 213–48 <<https://doi.org/10.1017/CBO9780511575372.009>>.

perdagangan dalam berbagai negosiasi yang dilakukan antar negara.<sup>118</sup> Perdagangan di sektor pertanian diatur oleh *World Trade Organization* (WTO), dimana sejak tahun 1995 negara-negara anggota sepakat dalam suatu perjanjian yang mengatur secara khusus perdagangan internasional pada sektor pertanian, yang dikenal dengan nama *Agreement on Agriculture*. Isi dalam perjanjian tersebut memuat negara-negara anggota WTO wajib untuk membebaskan hambatan perdagangan yang diterapkan pada produk-produk pertanian. Aktivitas kebijakan impor beras sendiri bagi negara anggota WTO sudah menjadi sesuatu yang tidak dapat dihentikan atau dihilangkan karena impor beras adalah salah satu bentuk perdagangan internasional yang pelaksanaannya haruslah bebas dari hambatan perdagangan. Sedangkan Indonesia telah meratifikasi ketentuan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 dimana WTO mewajibkan negara-negara anggotanya untuk menyesuaikan aturan yang termuat dalam pasal-pasal WTO terkait kebijakan akan pangan. Lebih lanjut aturan kebijakan pangan Indonesia juga dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.<sup>119</sup>

Terdapat tiga aspek yang terintegrasi dengan konsep ketahanan pangan, yaitu diantara aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Sedangkan untuk mewujudkan ketahanan pangan perlu sinergi dan interaksi diantara ketiga aspek tersebut. Menurut Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan, ketersediaan pangan dijelaskan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi

---

<sup>118</sup> Ibid, Atmadilaga.

<sup>119</sup> Akbar Kurnia Putra, 'Agreement on Agriculture Dalam World Trade Organizations', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46.1 (2016), 90 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no1.37>>.

kebutuhan.<sup>120</sup> Pengertian ini cukup menjelaskan bagaimana ketersediaan pangan diperoleh, yaitu berasal dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional.

Ketersediaan beras sebagai bahan pangan pokok merupakan bagian yang penting dalam penguatan ketahanan pangan nasional. Sebab beras memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia baik itu dipandang dari aspek ekonomi, lingkungan, sosial, tenaga kerja, budaya dan politik. Beras yang langka dapat mengganggu stabilitas ekonomi, stabilitas sosial dan politik. Oleh karena itu, apabila terkait dengan perberasan nasional pemerintah tidak pernah lepas dalam mengatur ekonomi perberasan nasional. Penyediaan beras baik itu di tingkat regional dan nasional memiliki tiga komponen, yaitu dengan produksi, cadangan/stok, dan penyediaan dari luar negeri (impor).

**Grafik 4.3 Produksi Beras Indonesia (2018-2021)**



Sumber: Badan Pusat Statistik<sup>121</sup>

\*juta ton

<sup>120</sup> Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, 2012 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39100>>.

Terkait dengan produksi beras dalam negeri, Badan Pusat Statistik merilis data produksi beras Indonesia antara tahun 2018 hingga 2021. Namun data yang ditemukan cukup mengejutkan, karena pada kenyataannya produksi beras Indonesia pada rentang tahun tersebut mengalami penurunan walau tidak secara signifikan. Dari data BPS mencatat pada tahun 2018 jumlah produksi beras sebesar 32,4 juta ton. Pada tahun berikutnya, produksi beras berkisar sebesar 31,3 juta ton beras. Selanjutnya pada tahun 2020 dan 2021 masing-masing produksi beras sebesar 31,5 juta ton dan 31,4 juta ton.<sup>122</sup> Sementara itu menurut BPS untuk konsumsi beras nasional pada tahun 2019 adalah 28,69 juta ton.<sup>123</sup> Konsumsi beras yang berkisar 28 juta ton ini dapat dipenuhi hanya dengan produksi beras dalam negeri, karena produksinya selalu melebihi 30 juta ton beras setiap tahun.

Sementara itu aspek akses terhadap pangan dan ketersediaan pangan adalah dua faktor terpenting dalam ketahanan pangan.<sup>124</sup> Namun ketersediaan pangan semata tidak menjamin aksesibilitas pangan. Akses atau keterjangkauan pangan sendiri tergantung pada dimensi fisik dan ekonomi. Dimensi fisik yang dimaksud adalah keterjangkauan dimana distribusi dari daerah yang surplus beras ke wilayah defisit beras. Sedangkan dimensi ekonomi berkaitan dengan daya beli masyarakat. Indikator ini diwujudkan melalui pemerataan beras melalui pendistribusian beras di masing-masing provinsi.

---

<sup>121</sup> Ibid, Kusnandar.

<sup>122</sup> Ibid, Kusnandar.

<sup>123</sup> Cindy Mutia Annur, 'BPS: Rumah Tangga Sumbang 72% Konsumsi Beras Nasional Pada 2019', 2021 <

<sup>124</sup> J. von Braun and others, *Improving Food Security of the Poor: Concept, Policy, and Programs*. (Washington D.C.: International Food Policy Research Institute, 1992) <<http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/oc23.pdf>>.

Aspek aksesibilitas akan pangan, termasuk beras juga sesuai dengan penugasan Perum BULOG yang bertugas menyediakan dan menyalurkan pangan pokok bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah sehingga dapat menjangkau pangan secara fisik dan ekonomi. Contohnya penyaluran Rastra untuk mendukung keterjangkauan secara fisik maupun ekonomi (harga jual terjangkau).<sup>125</sup>

Aksesibilitas akan pangan menjadi perhatian khusus bagi Perum BULOG karena hal tersebut bertujuan untuk efisiensi biaya distribusi. Indonesia memiliki beberapa daerah yang menjadi sentra produksi beras. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, wilayah tersebut antara lain, adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dimana hasil produksi berasnya berada di atas 2,5 – 5,7 juta ton. Sedangkan Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Aceh rata-rata menghasilkan 1 – 1,5 juta ton beras. Wilayah dengan surplus beras akan mendistribusikan berasnya ke wilayah defisit beras.

Semakin panjang rantai distribusi maka dapat menyebabkan semakin tingginya harga sebuah produk pangan, termasuk beras. Indonesia sendiri memiliki pola distribusi perdagangan beras melalui tiga rantai, yaitu produsen, distributor, pedagang eceran lalu kemudian ke konsumen. Dari hasil survei yang dilakukan BPS apabila dibandingkan distribusi perdagangan beras antara tahun 2019 dan 2020, total MPP<sup>126</sup> pada tahun 2019 yaitu 22,34% dari harga yang berasal dari petani. Sedangkan total MPP pada tahun 2020 yaitu 21,47% dari harga yang berasal dari petani.<sup>127</sup> MPP total mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya. Dari MPP

<sup>125</sup> Ibid, *Annual Report at a Glance*.

<sup>126</sup> Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) adalah kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian.

<sup>127</sup> Badan Pusat Statistik, *Pola Distribusi Perdagangan Komoditas Beras 2021* (Badan Pusat Statistik RI, 2021).

total tersebut menjelaskan pada tahun 2019 sebanyak 22,34% kenaikan harga dari produsen hingga konsumen. Sementara itu, pada tahun 2020 terdapat 21,47% kenaikan harga dari produsen hingga sampai ke konsumen. Hal tersebut berarti MPP total dari tahun 2019 turun sebanyak 0,87% pada tahun 2020.

Menurunnya MPP total berarti harga yang berasal dari produsen atau petani hingga ke konsumen tidak terpaut jauh. Dengan kata lain, harga dari petani kepada konsumen semakin rendah. Menjadi penting untuk mempersingkat mata rantai distribusi beras agar harga jualnya tidak terlampaui tinggi sehingga masyarakat dapat mengakses pangan lebih mudah. Oleh karena itu, menjadi jelas bahwa kedua dimensi, yaitu dimensi fisik dan dimensi ekonomi sangat erat kaitannya dalam akses akan pangan.

Adapun terkait aspek pemanfaatan pangan merujuk pada penggunaan pangan oleh rumah tangga terkait dengan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan termasuk di dalamnya adalah penganekaragaman konsumsi agar gizi yang tersedia beragam dan aman, yang juga sesuai dengan tujuan dari UU No.18 Tahun 2012.<sup>128</sup>

Namun terdapat permasalahan atau ancaman yang dihadapi dalam pencapaian ketahanan pangan nasional. Selain ancaman konversi lahan dan diversifikasi pangan yang masih rendah, tingginya angka impor gandum juga mengancam ketahanan pangan Indonesia. Hampir semua bahan olahan makanan menggunakan tepung untuk pembuatannya. Namun yang menjadi permasalahan adalah gandum tidak ditanam di Indonesia, sedangkan Indonesia sangat ketergantungan akan bahan pangan tersebut. Ancaman lain juga datang

---

<sup>128</sup> Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan, *Laporan Penyusunan Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA) Tahun 2021* (Makassar, 2021).

dari profesi petani yang saat ini tidak diminati oleh generasi muda. Generasi muda saat ini lebih memilih untuk bekerja di sebuah perusahaan atau di pabrik industri daripada menjadi petani. Generasi muda lebih memilih mencari pekerjaan di perkotaan daripada harus meneruskan untuk mengolah lahan di desa.

Sedangkan usaha untuk mewujudkan ketahanan pangan oleh Perusahaan Umum (Perum) BULOG dimandatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang diundangkan pada tanggal 13 Mei 2016 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2016 yang diundangkan pada tanggal 31 Mei 2016 menjadi sebuah payung hukum akan pentingnya andil pemerintah Indonesia dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan kestabilan pangan bagi rakyat.<sup>129</sup>

Pemerintah Indonesia melalui Perum BULOG bertugas menyediakan dan menyalurkan pangan pokok untuk tetap stabil dalam hal stabilitas harga dan pasokan di tingkat konsumen, serta meningkatkan kesiapan penanggulangan keadaan darurat, bencana, dan rawan pangan dari sisi konsistensi penyediaan pangan oleh pemerintah melalui pengelolaan stok BULOG dan cadangan pangan pemerintah.<sup>130</sup>

Secara umum dampak impor beras terhadap ketahanan pangan nasional Indonesia tahun 2017-2021 tidak berdampak terlalu signifikan. Dampak yang ditimbulkan berupa dampak negatif dan dampak positif, yaitu:

#### **4.3.1 Dampak Negatif**

Dampak negatif yang ditimbulkan terjadi pada tahun 2018, dimana saat itu produksi beras sebanyak 32,4 juta ton dengan jumlah impor berkisar 2,2 juta

---

<sup>129</sup> Ibid, Bulog 2019.

<sup>130</sup> Ibid, Bulog 2019.

ton beras. Kondisi tersebut sudah jelas menimbulkan dampak negatif karena produksi dalam negeri melimpah namun diiringi dengan kuota impor yang juga tinggi. Apabila produksi beras cukup dan impor yang dilakukan cukup besar maka hal itu berarti beras yang berada di pasaran akan berlimpah. Pemberlakuan impor ini berdampak negatif pada petani dalam hal fluktuasi harga beras, karena impor dilakukan pada saat produksi beras mencukupi konsumsi dan dilakukan selama sebulan sebelum, selama masa panen raya hingga setelah masa panen raya. Artinya jika dilakukan pada saat produksi beras berlimpah, maka beras impor yang masuk di pasaran akan mengakibatkan fluktuasi pada harga beras di pasaran.

Fluktuasi ini terjadi bermula dari kenaikan harga beras pada awal bulan Januari 2018. Berdasarkan data dari BPS, harga beras baik untuk mutu medium, premium, dan kualitas rendah masing-masing mengalami kenaikan. Namun pada akhir bulan menjelang bulan Februari, harga beras cenderung turun. Turunnya harga beras ini karena mulai dilakukan panen di beberapa wilayah di Indonesia. Namun sebelumnya pemerintah telah merespon kenaikan harga beras tadi dengan perencanaan impor beras yang diperkirakan akan datang pada masa panen raya. Sedangkan impor beras pada masa panen raya sendiri akan melukai para petani.

Fluktuasi harga beras memberikan dampak negatif pada petani. Harga beras rendah di pasaran akan menurunkan kesejahteraan petani akibat kecilnya angka pendapatan dari pekerjaannya. Imbasnya kemungkinan para petani akan pindah dan menanam komoditas pertanian lainnya yang memberikan keuntungan besar untuk mereka. Sedangkan apabila harga beras tinggi dikhawatirkan akan timbul rawan pangan bagi masyarakat yang berada di kelas menengah ke bawah.

#### **4.3.2 Dampak Positif**

Selain dampak negatif, impor beras juga berdampak positif untuk pencapaian ketahanan pangan. Dampak positif yang ditimbulkan, yaitu:

##### **a. Pemenuhan cadangan stok beras**

Ketahanan pangan tercapai apabila dapat memenuhi ketersediaan dan stok beras dalam negeri. Sehingga impor beras yang dilaksanakan tujuannya dilakukan untuk memastikan cadangan stok beras terpenuhi. Bahkan impor yang dilakukan pada tahun 2017, 2019, 2020 dan 2021 jumlahnya masih dalam skala kecil yaitu masing-masing berada di bawah 500 ribu ton dan beras yang diimpor adalah beras jenis khusus. Sehingga kegiatan impor pada rentang tahun tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap ketahanan pangan.

Selain itu lebih lanjut dijelaskan jika tolak ukur bagi Indonesia dikatakan tahan pangan dimuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyebutkan kondisi dimana pangan terpenuhi bagi negara hingga individu, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi untuk dapat hidup sehat dan aktif. Pemerintah Indonesia yang masih menjadikan ketersediaan pangan yang cukup sebagai tolak ukur dalam mengukur ketahanan pangan membuat penulis melihat bagaimana produksi beras dalam negeri dapat mencukupi kebutuhan konsumsi nasional. Dengan kondisi ini kita bisa melihat dari Grafik 4.3 produksi beras dari tahun 2018-2021 melebihi 30 juta ton setiap tahun dengan rata-rata produksi 35 juta metrik ton beras.

Apabila melihat perbandingan antara produksi beras dan konsumsi beras rata-rata 28 juta ton maka artinya hasil produksi beras dengan rata-rata lebih dari 30 juta ton beras mencukupi kebutuhan penduduk Indonesia, karena melebihi

konsumsi nasional setara 28 juta ton. Sisa dari produksi tersebut juga dialokasikan untuk cadangan beras pemerintah. Namun karena pertimbangan beras yang disimpan terlalu lama dapat merusak kualitas beras, dan pertimbangan lain seperti stok beras untuk keadaan darurat maka pemerintah tetap melakukan impor beras walaupun masih dalam skala kecil.

Sedangkan dalam mencapai aspek pangan yang beragam, bergizi, dan aman dilakukan diversifikasi pangan berupa diversifikasi konsumsi pangan agar masyarakat dapat mengonsumsi pangan yang bervariasi, dengan nutrisi dan sumber gizi yang lebih beragam. Hal ini salah satunya juga bertujuan untuk menggiatkan potensi produk pangan non beras di wilayah yang bukan sentra penghasil beras. Contohnya, apabila wilayah tersebut adalah sentra produksi jagung, maka daerah tersebut dapat menjadikan jagung sebagai pangan dengan sumber karbohidrat. Masyarakat yang berada di daerah tersebut dapat mengonsumsi jenis pangan yang beragam dan bergizi, konsumsi beras cenderung menurun dan permintaan impor beras yang dilakukan pemerintah di daerah tersebut juga dalam skala kecil.

#### **b. Impor beras lazim dilakukan selama kuota impor masih kecil**

Impor beras yang dilakukan oleh Indonesia adalah aktivitas yang lazim dilakukan selama jumlahnya tidak besar. Indonesia sebagai negara anggota WTO tidak dapat menghindari dari kegiatan mengimpor komoditas barang termasuk beras dari luar, sehingga kegiatan impor merupakan sesuatu yang wajar dilakukan bagi suatu negara sebagai aktivitas dari perdagangan internasional itu sendiri. Pertimbangan ini juga seiring dengan pernyataan penulis yang menganggap bahwa impor beras yang dilakukan bersifat politis. Impor adalah aktivitas yang lumrah dilakukan tatkala menjadi negara anggota WTO. Sedangkan terdapat sebuah perjanjian internasional yang terdapat dalam

kerangka tubuh WTO, yaitu *Agreement on Agriculture* (AOA) yang memaksa Indonesia mau tidak mau harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku dan terbuka akan barang impor yang masuk ke Indonesia terkait bahan pangan.

### **c. Tujuan impor bersifat politis**

Pertimbangan lain yang menjadikan aktivitas impor beras tidak begitu signifikan karena impor beras yang dilakukan dengan Vietnam memiliki tujuan politis dilihat dari adanya perjanjian kerjasama antara kedua negara dalam bidang perdagangan beras, yaitu *MoU on Rice Trade* yang sifatnya fleksibel karena Indonesia tidak harus selalu melakukan impor hingga satu juta ton dari Vietnam untuk memenuhi stok cadangan berasnya. Bahkan kerjasama yang sebelumnya dimulai pada tahun 2005 dan masih berlanjut hingga tahun 2017. Artinya perpanjangan *MoU* dalam rangka perdagangan beras dilakukan demi menjalin dan menjaga hubungan yang baik karena puluhan tahun Vietnam telah membantu Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pangan Indonesia saat produksi beras dalam negeri tidak mencukupi. Apabila produksi beras surplus dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat maka impor untuk beras jenis umum tidak perlu dilakukan oleh Indonesia. Impor beras yang dilakukan hanya pada beras jenis tertentu dan Vietnam hadir sebagai negara yang selalu bersedia memenuhi akan permintaan tersebut sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah terjalin. Terlebih jumlah impor pada rentang waktu 2017-2021 fluktuatif dan cenderung dalam skala kecil (berada di bawah 1 juta ton untuk perhitungan pemenuhan stok beras yang aman), kecuali pada tahun 2018, artinya sisa produksi dalam negeri juga dialokasikan untuk pemenuhan stok beras dalam negeri.

Pernyataan penulis ditunjang oleh pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Bpk. M. Affandi Noho dalam wawancara secara tidak terstruktur bersama penulis yang juga menjelaskan bahwa impor tidak begitu berdampak karena ketersediaan terpenuhi. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa impor yang dilakukan untuk cadangan stok saja, yaitu harus memenuhi 1 juta ton beras. Ia juga mengatakan terkhusus Sulawesi Selatan adalah provinsi dengan lumbung beras dan memproduksi lebih 2 juta ton beras. Tetapi apabila dikatakan Indonesia secara keseluruhan sudah pasti impor tetap ada, impor dilakukan untuk wilayah lain yang kekurangan produksi berasnya.

Oleh karena itu, dengan pertimbangan produksi dalam negeri yang mencukupi kebutuhan masyarakat serta usaha pemerintah Indonesia untuk melakukan berbagai upaya untuk terus memenuhi tersedianya pangan yang aman, beragam dan bergizi untuk hidup aktif dan sehat menjawab bahwa ketahanan pangan dapat terwujud pada tingkat nasional.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Impor beras merupakan kegiatan memasukkan beras ke dalam daerah pabean Indonesia. Indonesia adalah negara produsen beras terbesar ketiga di dunia setelah Tiongkok dan India. Walaupun menjadi negara produsen terbesar Indonesia tetap melakukan impor beras untuk pemenuhan kebutuhannya. Beberapa faktor yang mempengaruhi Indonesia melakukan impor antara lain, pertumbuhan penduduk, konversi lahan sawah, dan stabilisasi melalui stok beras.

Vietnam menjadi salah satu mitra perdagangan beras bagi Indonesia. Sejak tahun 2005 Indonesia melakukan kerjasama dengan Vietnam yang dituangkan dalam *MoU on Rice Trade* dengan tujuan Vietnam menjamin kebutuhan beras Indonesia 1 – 1,5 juta ton beras setiap tahunnya. Kerjasama tersebut tidak lain sebagai pemenuhan cadangan stok beras Indonesia sehingga sifatnya fleksibel dan tidak harus dilakukan impor beras 1 juta ton setiap tahunnya.

Melihat pertimbangan konsumsi 28 juta ton beras dapat dicukupi dengan produksi beras yang melebihi 30 juta ton beras setiap tahunnya maka dapat dikatakan bahwa tingkat ketahanan pangan Indonesia saat ini berada pada keadaan yang aman. Bahkan selisih sebanyak 2 juta ton beras tersebut tentu dialokasikan untuk kepentingan lain, salah satunya untuk pemenuhan cadangan stok beras. Sedangkan untuk pemenuhan pangan yang beragam sendiri diwujudkan dalam usaha pemerintah untuk melakukan diversifikasi pangan selain beras.

Mempertimbangkan hal tersebut, pada dasarnya ketahanan pangan Indonesia termasuk baik dalam hal ketersediaan beras dalam negeri. Impor beras yang dilakukan ke Indonesia secara keseluruhan maupun dari Vietnam secara khusus pun dalam skala kecil dan karena hal itu dampaknya terhadap ketahanan pangan tidak terlalu signifikan. Beras yang diimpor juga termasuk dalam beras khusus, seperti beras yang tidak ditanam atau jumlah produksi beras khusus tersebut rendah dalam negeri. Beras yang diimpor oleh pemerintah Indonesia, yaitu beras ketan utuh, beras basmati, beras japonica, beras jasmine, beras pecah, beras Hom Mali, dan beras kukus. Sehingga dari pemberlakuan impor beras ini untuk rentang waktu tahun 2017-2021 tidak berdampak signifikan, karena terdapat dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif berupa harga beras yang fluktuatif sedangkan dampak positifnya yaitu pemenuhan stok beras. Sehingga dampak impor beras tidak mempengaruhi ketahanan pangan, karena produksi beras mencukupi konsumsi dengan upaya untuk diversifikasi pangan. Untuk hal lain yang menjadi pertimbangan tidak signifikkannya dampak impor ini, yaitu adanya tujuan politis melalui nota kesepahaman yang dibentuk antara kedua negara. Jejak historis yang terjalin antara kedua negara melandasi bagaimana kesepakatan tersebut diperpanjang dari tahun ke tahun terkait pemenuhan beras bagi Indonesia.

## **5.2 Saran**

Terdapat beberapa saran dari penulis, antara lain pertama; pemerintah Indonesia harus berpihak dan mensejahterakan petani lokal. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan subsidi pupuk, bantuan alat dan mesin pertanian atau memberikan insentif kepada para petani agar dapat memacu mereka untuk memproduksi beras. Pemerintah juga perlu menggaungkan diversifikasi pangan

dan memperhatikan keragaman dan kualitas gizi pangannya dengan memanfaatkan pangan lokal selain beras untuk dijadikan sumber pangan pokok.

Kedua, yang juga menjadi penting adalah keseragaman data yang dimiliki antar lembaga pemerintah. Karena kebijakan impor beras harus dengan cermat diperhatikan melalui perhitungan tepat tentang ketersediaan pangan melalui produksi dalam negeri, cadangan pangan dan kebutuhan konsumsi nasional maka pemerintah dapat lebih bijak mengeluarkan kebijakan besaran kuota beras impor yang benar-benar dibutuhkan oleh Indonesia. Keputusan impor harus dibuat dengan kalkulasi matang dan didasari atas alasan yang kuat. Impor beras juga tidak boleh dilakukan apabila bertepatan pada masa panen raya. Pemerintah Indonesia harus berhati – hati mengeluarkan narasi impor beras, apalagi jika mendekati masa panen raya karena disamping akan menyakiti hati para petani yang berjuang dalam mewujudkan surplus beras dalam negeri, tentu juga akan membuat harga beras dalam negeri anjlok karena gempuran beras yang masuk ke Indonesia. Selain itu, yang sangat penting kemudian adalah keputusan impor beras harus menjadi kebijakan terakhir yang diambil pemerintah untuk pemenuhan cadangan berasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Bakry, Umar Suryadi. 2016. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Budiastuti, Dyah & Agustinus Bandur. 2018. *Validitas Dan Reabilitas Penelitian*, Binus Jakarta: Mitra Wacana Media.

Harry, Waluya. 2003. *Ekonomi Internasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Haryono, Iranita., dkk. 2020. *Ketahanan Pangan*. Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia.

Kristiawan. 2021. *Ketahanan Pangan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Mashud, Musta'in. 2007. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, ed. by Bagong Suyanto & Sutinah, Edisi Ketiga. Jakarta: Prenadamedia Group.

Sabarella, dkk. 2021. *Analisis Ketahanan Pangan Tahun 2021*. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian.

Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.

### Dokumen:

(PERPRES), Peraturan Presiden, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (PERUM) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional*, 2016

*Badan Pusat Statistik Impor Beras Menurut Negara Asal Utama 2000-2020*. 2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan, *Laporan Penyusunan Peta*

*Ketahanan Dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA) Tahun 2021* (Makassar, 2021)

Lisbet, 'Peningkatan Kerja Sama Bilateral Indonesia-Vietnam',  
[Http://Berkas.Dpr.Go.Id/](http://Berkas.Dpr.Go.Id/) Vol. IX, N.16 (2017)  
 <[http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/InfoSingkat-IX-2-II-P3DI-Januari-2017-238.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/InfoSingkat-IX-2-II-P3DI-Januari-2017-238.pdf)>

Menteri Perdagangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Beras*, 2018.

Perum BULOG, *2019 Annual Report at a Glance*. 2019.

Sabarella, 'Konsumsi dan Neraca Penyediaan – Penggunaan Beras', Buletin Konsumsi Pangan, 10.1 (2019),  
 <<http://epublikasi.setjen.pertanian.go.id/epublikasi/buletin/konsumsi/2019/Buletin%20Konsumsi%20Vol%2010%20No%201%202019.htm>> [Diakses tanggal 3 April 2022] (Bab IV)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan,  
 <[https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download\\_index/files/47355-02.17-tahun-2006-kepabeanaan.pdf](https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/47355-02.17-tahun-2006-kepabeanaan.pdf)> [Diakses tanggal 1 Mei 2022]

*Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*, 2012  
 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39100>>

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*, 2012

**E-book :**

Maxwell, Simon, and Timothy R. Frankernberger, *Household Food Security: Concepts, Indicators, Measurements, Technical Review* (New York: UNICEF and IFAD, 1992)

Maxwell, Simon, and Timothy R. Frankernberger, *Household Food Security: Concepts, Indicators, Measurements, Technical Review* (New York: UNICEF and IFAD, 1992)

Simon, George Andre, 'Food Security: Definition, Four Dimensions, History.', *Computational Mathematics and Modeling*, 17.4 (2012), 341–53  
<<https://doi.org/10.1007/s10598-006-0028-y>>

Statistik, Badan Pusat, *Statistik Inodnesia 2017* (Badan Pusat Statistik, 2017)

Statistik, Badan Pusat, *Konsumsi Bahan Pokok 2019* (Badan Pusat Statistik, 2019)

Statistik, Badan Pusat, *Pola Distribusi Perdagangan Komoditas Beras 2021* (BPS RI, 2021)

#### **Jurnal :**

Abidin, M Zainul, 'Dampak Kebijakan Impor Beras Dan Ketahanan Pangan Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial Impact of the Rice Import Duty Policy and Food Security in the Perspective of Social Welfare', *Jurnal Sosio Informa*, 1.3 (2015), 213–30  
<<https://media.neliti.com/media/publications/52839-ID-dampak-kebijakan-impor-beras-dan-ketahan.pdf>>

Abrar, Sahrul Paipan & Muhammad, 'Determinan Ketergantungan Impor Beras Di Indonesia ( Determinants of Rice Import Dependency in Indonesia )', *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 11.01 (2020), 53–64

- Arlyan, Reni, 'Hubungan Ketahanan Pangan Dan Stabilitas Keamanan Negara (Krisis Pangan Di Venezuela)', *Jurnal Dinamika Global Hubungan Internasional*, 3.01 (2018), 108–31  
<<https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jdg.v3i01.59>>
- Atmadilaga, Rangga Utama, 'Liberalisasi Perdagangan Sektor Beras Dan Ketahanan Pangan Di Indonesia' (Universitas Katolik Parahyangan, 2017)  
<[http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/2025/Cover - Bab 1 - 3111061sc-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/2025/Cover%20-%20Bab%201%20-%203111061sc-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y)>
- Bachri, Bachtiar S, 'Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif', *Teknologi Pendidikan*, 10 (2010), 46–62
- Benny, Jimmy, 'Ekspor Dan Impor Pengaruhnya Terhadap Posisi Cadangan Devisa Di Indonesia', *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1.4 (2013), 1406–15
- Braun, J., H.E. Bouis, S.K. Kumar, and R. Pandya-Lorch, *Improving Food Security of the Poor: Concept, Policy, and Programs*. (Washington D.C.: International Food Policy Research Institute, 1992)  
<<http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/oc23.pdf>>
- Brooks, Douglas H., Benno Ferrarini, and Eugenia C. Go, 'Bilateral Trade and Food Security', *ADB Economics Working Paper Series*, 367.367 (2013), 1–37 <<https://doi.org/10.1142/s1793993313500154>>
- Burhan, Zulkhair, 'Peran Sulawesi Selatan Dalam Strategi Lumbung Pangan BIMP-EAGA (BIMP-EAGA Food Basket Strategy)', *Jurnal Wanua*, 1.01 (2015), 58–76
- Christianto, Edward, 'Faktor Yang Memengaruhi Volume Impor Beras Di

- Indonesia', *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomia Asia*, 7.2 (2013), 38–43
- Clapp, Jennifer, 'Food Security and International Trade Unpacking Disputed Narratives', *Food and Agriculture Organization of the United Nations*, 2015, 33 <<https://doi.org/10.2307/2620834>>
- Djamaluddin, Magfirah, Andi Ramlan, and Muh. Jayadi, 'Monitoring Perubahan Areal Persawahan Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus: Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa)', *Jurnal Ecosolum*, 8.1 (2019), 1 <<https://doi.org/10.20956/ecosolum.v8i1.6892>>
- Febriaty, Hastina, 'Analisis Perkembangan Impor Beras Di Indonesia', *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 16.2 (2016), 134–41 <<https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v16i2.941>>
- Hermawan, Iwan, 'Analisis Perdagangan Beras Dan Ketahanan Pangan Di Negara-Negara Asia Tenggara', *Politica*, 4.2 (2013), 157–96
- Hermawan, Sulhani, 'Dampak Peraturan Tentang Impor Beras Terhadap Kegagalan Ketahanan Pangan Dan Kemiskinan Petani Di Indonesia', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 42.4 (2012), 456 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol42.no4.266>>
- Hidayat, Yusup Rachmat, 'Distribusi Beras Bulog Pasca Bansos Rastra Dan Bantuan Pangan Non Tunai', *Jurnal Logistik Indonesia*, 2.2 (2019), 1–14 <<https://doi.org/10.31334/jli.v2i2.293>>
- Ismail, Idrus, 'Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Konsumsi Beras Di Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo', *Gorontalo Development Review*, 1.1 (2018), 74 <<https://doi.org/10.32662/golder.v1i1.117>>
- Khaidir, Redha Irwan, 'Kontribusi FAO Dalam Mengatasi Masalah Ketahanan

Pangan Di Indonesia', *Hubungan Internasional* (Universitas Jember, 2016)

Kusumah, Fabian Pratama, 'Ekonomi Politik Dalam Kebijakan Impor Beras, Membaca Arah Kebijakan Pemerintah 2014-2019', *Jurnal Ilmu Politik*, 10.2 (2019), 137–62

Mashithoh Azzahra, Dian, Amri Amir, and Siti Hodijah, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Impor Beras Di Indonesia Tahun 2001-2019', *E-Journal Perdagangan Industri Dan Moneter*, 9.3 (2021), 181–92  
<<https://doi.org/10.22437/pim.v9i3.14642>>

Mulyani, Anny, Dwi Kuncoro, Dedi Nursyamsi, and Fahmuddin Agus, 'Analisis Konversi Lahan Sawah: Penggunaan Data Spasial Resolusi Tinggi Memperlihatkan Laju Konversi Yang Mengkhawatirkan', *Jurnal Tanah Dan Iklim*, 40.2 (2016), 121–33  
<<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2017/jti.v40i2.5708>>

Namira, Yona, Iskandar Andi Nuhung, and Mudatsir Najamuddin, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Impor Beras Di Indonesia', *Agribusiness Journal*, 11.2 (2019), 183–201 <<https://doi.org/10.15408/aj.v11i2.11843>>

Nations, United, 'International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights', December 1966, 213–48  
<<https://doi.org/10.1017/CBO9780511575372.009>>

Nugroho, Agus Dwi, Jamhari Jamhari, and Jangkung Handoyo Mulyo, 'Dinamika Perdagangan Beras Vietnam', *Jurnal Agro Ekonomi*, 2017, 50  
<<https://doi.org/10.22146/agroekonomi.17697>>

Nurdin, Vivit Bartoven & Yeni Kartini, "Belum Makan Kalau Belum Makan Nasi": Perspektif Sosial Budaya Dalam Pembangunan Ketahanan Pangan', *Jurnal*

*Sosiologi*, 19.1 (2017), 9–25

Onu, D.O., J.B. Simonyan, and C.E. Onyenweaku, 'Determinants of Rice Production and Import in Nigeria ( 1970 – 2016 ): An Application of Co-Integration and Error Correction Model', *Futo Journal Series*, 3.2 (2017), 16–34

Purbayu Budi Santosa, Ondo Harinduan PS, 'Analisis Impor Beras Indonesia Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya', *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 3.2 (2006), 193–209  
<<https://media.neliti.com/media/publications/294057-analisis-impor-beras-indonesia-dan-fakto-8644bcc0.pdf>>

Putra, Akbar Kurnia, 'Agreement on Agriculture Dalam World Trade Organizations', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46.1 (2016), 90  
<<https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no1.37>>

Putri, Ardila, 'Pengagendaan Isu Pangan Sebagai Isu Pangan Pada Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (Sby): Studi Pada Kebijakan Food Estate', *Jurnal PIR: Power in International Relations*, 4.1 (2020), 16  
<<https://doi.org/10.22303/pir.4.1.2019.16-31>>

Rachman, Benny, Adang Agustian, and NFN Wahyudi, 'Efektivitas Dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)', *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, 16.1 (2018), 1 <<https://doi.org/10.21082/akp.v16n1.2018.1-18>>

Rachman, Benny dan Saktyanu K. Dermoredjo, 'Dinamika Harga Dan Perdagangan Beras', *Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian*, 2004 <<https://www.litbang.pertanian.go.id>>

- Rakib, Wahyudi, *Kebijakan Politik Pangan Di Indonesia Pada Masa Pemerintahan SBY-Boediono (Studi Kasus: Kebijakan Pengadaan Beras Untuk Kebutuhan Masyarakat Di Indonesia)*, 2017
- Rusono, Nono, 'Kebijakan Penguatan Pengelolaan Stok Beras Pemerintah Strengthening Policy on Government Rice Stock Management', *Jurnal Pangan*, 28.3 (2019), 227–38
- Sa'idy, I'id Badry, 'Analisis Daya Saing Komoditas Tekstil Dan Produk Tekstil Indonesia Di Amerika Serikat', *Economics Development Analysis Journal*, 2.4 (2013), 269–76
- Sawit, Husein M, 'Program Raskin : Keserasian Antara Produksi, Pengadaan Dalam Negeri Dan Dukungan Politik', *Jurnal Pangan*, 21.1 (2012), 71–84
- Sayaka, B, and H Tarigan, 'Efektivitas Peraturan Dalam Mengendalikan Konversi Lahan Pertanian', *Konversi Dan Fragmentasi Lahan ...*, 2011  
<<http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/konversi-fragmentasi-lahan/BAB-V-6.pdf>>
- Srirahayu, Dina, 'Upaya Memperkuat Posisi Beras Vietnam Di Pasar Global Melalui Branding', *Jurnal Kajian Wilayah*, 11.1 (2020), 51  
<<https://doi.org/10.14203/jkw.v11i1.831>>
- Suharyanto, Heri, 'Ketahanan Pangan Heri Suharyanto \* Abstrak', *Sosial Humaniora*, 4.2 (2011), 186–94  
<<http://iptek.its.ac.id/index.php/jsh/article/view/633/355>>
- Suryana, Achmad, and Ketut Kariyasa, 'Ekonomi Padi Di Asia: Suatu Tinjauan Berbasis Kajian Komparatif', *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 26.1 (2016), 17 <<https://doi.org/10.21082/fae.v26n1.2008.17-31>>

Winardi, Rijath Djatu, 'Metoda Wawancara', *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*, September 2018, 2018, 53–99

**Website:**

Anggara, Dedhez, 'Mendag Akan Impor Beras 500 Ribu Ton, Ini Perbandingan Harga Beras Di ASEAN', 2018 <<https://www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2018-01-15/mendag-akan-impor-beras-500-ribu-ton-ini-perbandingan-harga-beras-di-asean>>

Annur, Cindy Mutia, 'BPS: Rumah Tangga Sumbang 72% Konsumsi Beras Nasional Pada 2019', 2021

Anwar, Muhammad Choirul, 'Jokowi Sebut Hampir 3 Tahun Tak Impor Beras, Benarkah?', 2021  
<<https://money.kompas.com/read/2021/03/27/082824826/jokowi-sebut-hampir-3-tahun-tak-impor-beras-benarkah?page=all>> [accessed 20 July 2022]

'Berapa Impor Beras Indonesia 2017?', 2017  
<[boks.katadata.co.id/datapublish/2017/12/07/berapa-impor-beras-indonesia-2017#:~:text=Volume Impor Beras Indonesia 2017](https://boks.katadata.co.id/datapublish/2017/12/07/berapa-impor-beras-indonesia-2017#:~:text=Volume Impor Beras Indonesia 2017)> [accessed 24 July 2022]

'BPS: Produksi Beras RI Hanya 32,4 Juta Ton Di 2018 - Bisnis Liputan6.Com'  
<<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3673791/bps-produksi-beras-ri-hanya-324-juta-ton-di-2018>> [accessed 4 July 2022]

BULOG: Stok Beras Nasional Aman Capai 1 Juta Ton, 2021  
<<http://www.bulog.co.id/2021/03/28/bulog-stok-beras-nasional-aman-capai-1-juta-ton/>> [accessed 20 July 2022]

Cindy Mutia Annur. 2020, 'Sektor Pertanian Paling Banyak Menyerap Tenaga Kerja Indonesia',

<[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/12/sektor-pertanian-paling-banyak-menyerap-tenaga-kerja-indonesia#:~:text=Badan%20Pusat%20Statistik%20\(BPS\)%20menyebut,atau%20sekitar%2029%2C76%25](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/12/sektor-pertanian-paling-banyak-menyerap-tenaga-kerja-indonesia#:~:text=Badan%20Pusat%20Statistik%20(BPS)%20menyebut,atau%20sekitar%2029%2C76%25)> [Diakses tanggal 3 April 2022]

Databoks Katadata. 2018, 'Berapa Stok Beras Perum BULOG?' <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/16/berapa-stok-beras-perum-BULOG>> [Diakses tanggal 6 April 2022]

Deny, Septian, 'Stok Beras Di Awal 2017 Mencapai 1,8 Juta Ton', 2017 <<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2844289/stok-beras-di-awal-2017-mencapai-18-juta-ton>> [accessed 20 July 2022]

Fauzi, Achmad, 'Kemendag Benarkan Indonesia Tidak Lagi Impor Beras', 2017 <<https://money.kompas.com/read/2017/03/28/123205526/kemendag.benarkan.indonesia.tidak.lagi.impor.beras>> [accessed 29 April 2022]

'Food Security - International Relations - LibGuides at Michigan State University Libraries' <<https://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=96739&p=626933>> [accessed 12 April 2022]

Impor Beras Menurut Negara Asal Utama, 2000-2020, *Badan Pusat Statistik*, 2021 <<https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1043/impor-beras-menurut-negara-asal-utama->> [accessed 5 July 2022]

Kusnandar, Viva Budy, 'Berapa Produksi Beras Indonesia Pada 2021?', 2022 <[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/02/berapa-produksi-beras-indonesia-pada-2021#:~:text=Produksi Beras Indonesia \(2018-2021\)&text=Badan Pusat Statistik \(BPS\) mencatat,31%2C36 juta ton](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/02/berapa-produksi-beras-indonesia-pada-2021#:~:text=Produksi Beras Indonesia (2018-2021)&text=Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat,31%2C36 juta ton)>

beras.> [accessed 24 June 2022]

Lidyana, Vadhia, '106.000 Ton Beras Impor 2018 Terancam "Busuk" Di Gudang Bulog', 2021 <<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5507716/106000-ton-beras-impor-2018-terancam-busuk-di-gudang-bulog>> [accessed 21 July 2022]

Milled Rice Exports by Country in 1000 MT', 2022 <<https://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=milled-rice&graph=exports>>

Mundi, Index, 'Milled Rice Domestic Consumption by Country in 1000 MT', 2022 <<https://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=milled-rice&graph=domestic-consumption>>

Murdaningsih, Dwi., Satya Festiani. 2012, '*Indonesia Continues It's Rice Import From Vietnam*' < <https://www.republika.co.id/berita/malu3g/indonesia-continues-its-rice-import-from-vietnam>> [Diakses tanggal 6 April 2022]

Pablo, Samuel, 'Bulog Setujui Impor 346.000 Ton Beras Dari 8 Perusahaan', 2018 <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20180122115016-4-2139/bulog-setujui-impor-346000-ton-beras-dari-8-perusahaan>> [accessed 5 July 2022]

Priyatmoko, Heri, 'Krisis Pangan Di Indonesia Sudah Terjadi Sejak Jaman Dahulu - KAGAMA' <<http://kagama.id/heri-priyatmoko-krisis-pangan-di-indonesia-sudah-terjadi-sejak-jaman-dahulu/>> [accessed 5 June 2022]

Presilla, Mayasuri. 2021. Mengulas Peran Startegis Beras di Negara Vietnam, <<http://psdr.lipi.go.id/news-and-events/opinions/mengulas-peran-strategis-beras-di-negara-vietnam.html>> [Diakses tanggal 10 April 2022]

Rachman, Fadhly Fauzi, 'Mentan: Stok Beras 2017 Aman', 2017  
 <<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3412028/mentan-stok-beras-2017-aman>> [accessed 20 July 2022]

Rusiana, Dita Angga, 'Alih Fungsi Lahan Persawahan Jadi Perkebunan Kelapa Sawit Di Penajam Paser Utara Sulit Dibendung', 2022  
<https://kaltim.inews.id/berita/alih-fungsi-lahan-persawahan-jadi-perkebunan-kelapa-sawit-di-penajam-paser-utara-sulit-dibendung> [accessed 18 July 2022]

Sobih AW Adnan. 2016, 'BULOG dan Swasembada Pangan Era Orba',  
 <<https://www.medcom.id/telusur/medcom-files/ObzJ1R1b-BULOG-dan-swasembada-pangan-era-orba>> [Diakses tanggal 3 April 2022]

Tim Sindonews. 2019, 'Keberhasilan Swasembada Pangan Era Soeharto Dinilai Patut Ditiru',  
 <<https://nasional.sindonews.com/berita/1410322/12/keberhasilan-swasembada-pangan-era-soeharto-dinilai-patut-ditiru?showpage=all>>

Universal Declaration of Human Rights <<https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>> [accessed 18 July 2022]

'USDA ERS - Rice Sector at a Glance'  
 <<https://www.ers.usda.gov/topics/crops/rice/rice-sector-at-a-glance/>>  
 [accessed 16 June 2022]

Widyastuti, Ariyani Yakti, 'Begini Perjalanan Polemik Impor Beras Sejak Awal 2018', 2018  
 <<https://bisnis.tempo.co/read/1128490/begini-perjalanan-polemik-impor-beras-sejak-awal-2018>> [accessed 20 July 2022]



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL

Nomor : 1118/B/DFEIS-UNIFA/VII/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Pimpinan Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Di-

Tempat

Dengan Hormat,

Disampaikan Bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi & Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar Yang Tersebut Namanya Dibawah Ini Bermaksud Mengadakan Penelitian Pada Perusahaan/Instansi Yang Bapak/Ibu Pimpin Serangkaian Dengan Penulisan Skripsi Yang Diprogramkan Pada Semester Genap Tahun Akademik 2021-2022. Adapun Penelitian Yang Dimaksud Untuk Memperoleh Data-Data Pendukung Sekaitan Dengan Judul Skripsi Yang Akan Ditulis.

Sehubungan Dengan Maksud Tersebut, Kami Mohon Kepada Bapak/Ibu Kiranya Berkenan Memberikan Izin/Kesempatan Kepada Mahasiswa :

| No | Stambuk    | Nama         | Jenjang          | Prodi/Konsentrasi                                      |
|----|------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. | 1810521005 | Citra Yunita | Strata Satu (S1) | Hubungan Internasional / Ekonomi Politik Internasional |

Judul Tugas Akhir : "DAMPAK IMPOR BERAS VIETNAM KE INDONESIA TAHUN 2017-2021 TERHADAP KETAHANAN PANGAN INDONESIA".

Data Yang Dibutuhkan :

- Wawancara, Terkait Kondisi Ketahanan Pangan Indonesia

Demikian Permohonan Kami, Atas Bantuan Dan Kerjasama Yang Baik Disampaikan Terima Kasih.

Makassar, 27 July 2022

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial,

Dekan,



**Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom**

NIDN : 0925096902

Tembusan Kepada Yth :

- Ketua Prodi Hubungan Internasional
- Peringgal
- Kontak Person : (082296345252)

## Lampiran 2. Surat Balasan Izin Penelitian




**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**  
 Jalan DR. Ratulangi No. 47. Telpun (0411) 871 050 - 874 742; Fax: (0411) 874 070  
 MAKASSAR 90132

---

Makassar, 01 Agustus 2022

Nomor : 008/1412/VIII/2022/DKPn  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada  
 Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Universitas Fajar  
 di-  
 Makassar

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor 1118/B/DFEIS-UNIFA/VIII/2022 tanggal 27 Juli 2022 Perihal Permohonan Izin Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa atas nama Citra Yunita dengan judul "Dampak Impor Beras Vietnam Ke Indonesia Tahun 2017 - 2021 Terhadap Ketahanan Pangan Indonesia".

Pertu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut di tempat kami
2. Izin melakukan penelitian diberikan semata-mata untuk keperluan akademik

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



**KEMAL REDINDO SYAHRUL PUTRA, SH, MH**  
 Kepala Pembina  
 NIP: 19810907 200901 1 006

### **Lampiran 3. Hasil Wawancara Penelitian.**

Wawancara dengan Bpk. M. Affandi Noho selaku Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan.

Penulis : “Apa dampak impor beras terhadap ketahanan pangan Indonesia?”

M. Affandi Noho : “Dampak impor kalau dilihat tidak terlalu berdampak bahkan kita disini (Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan) menolak adanya impor beras. Sedangkan untuk ketersediaan beras itu sudah mencukupi, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan kami bahkan tidak impor. Wilayah kita memproduksi lebih dari 2 juta ton, bahkan kita melakukan ekspor ke Jakarta dan daerah lain yang defisit.”

Penulis : “Lalu mengapa jika saya lihat data dari BPS tercatat bahwa Indonesia tiap tahunnya melakukan impor beras?”

M. Affandi Noho : “Kalau itu untuk wilayah yang defisit beras. Tapi untuk Sulawesi Selatan selalu surplus beras. Tapi ada yang harus diperhatikan yaitu cadangan stok. Cadangan stok itu harus memenuhi 1 juta ton beras. Stok itu baru digelontorkan oleh pemerintah jika terjadi gejolak harga.”

#### Lampiran 4. Dokumentasi Hasil Penelitian



Wawancara dengan Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan.